



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II (dua)
Rapat Ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 19 Februari 2020
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d 16.10 WIB
Tempat	: Ruang rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: Membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo / Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 36 dari 54 orang Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 10 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) 2. H. Sunarna, SE., M.Hum. 3. Ir. Effendi Sianipar 4. H. Yadi Srimulyadi 5. Ir. Mindo Sianipar 6. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 7. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 8. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A. 9. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si. 10. Riezky Aprilia, S.H., M.H. 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 7 Dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua)
2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Firman Soebayo, S.E., M.H.
4. Ichsan Firdaus
5. Budhy Setiawan
6. Ir. Panggah Susanto, M.M.
7. Alien Mus

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

5 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua)
2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Sumail Abdullah
4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
5. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

1 dari 5 orang Anggota

1. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

4 dari 6 orang Anggota

1. H. Muntarom, S.Sos.
2. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
3. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
4. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. DR. Suhardi Duka, M.M.
2. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
3. Muslim, S.Hl., M.M.
4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
3. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

2 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.

10. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekjen KLHK);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Irjen KLHK);
5. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK);
6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK);
7. Ir. Wiratno, M.Sc. (Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK);
9. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK);
10. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK);
11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK);
12. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK);
13. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK); dan
14. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut/BRG).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirahim.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya,
Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut dan jajarannya,
Serta hadirin yang saya hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Bamus tanggal 16 Desember 2019 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2020. Pada hari Rabu, 19 Februari 2020, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas kerja tahun anggaran 2020 yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Restorasi Gambut atau BRG.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI, saat ini Rapat Kerja Komisi IV DPR RI telah ditandatangani sebanyak 25 Anggota dari 54 Anggota terdiri dari 8 Fraksi. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 246, Pasal 251 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Akan tetapi karena belum kuorum, baru 25 Anggota maka Rapat Kerja saya skors. Kalau mau pulang ke Aceh pulang saja tidak usah pakai bilang 2 hari. Rapat saya skors 5 menit.

(RAPAT DISKORS)

Sambil kita skors saya ingin menyampaikan Rapat Kerja pada hari ini dimulai pada pukul 10.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 17.30 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI atau kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Kalau sama Kementerian Lingkungan Hidup tidak pecah tapi kalau sama Kementerian Pertanian masih mungkin.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Rapat Kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020. Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut telah dibahas secara rinci setiap program per eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2020, anggaran Belanja Kemenerian/Lembaga tahun anggaran 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebesar Rp9.319.325.816.000,00 termasuk di dalamnya. Anggaran belanja Badan Restorasi Gambut Rp312.995.525.000,00 ini anggarannya semakin lama bukan semakin naik tetapi semakin turun. Maka nanti kalau gambutnya tidak terjaga jangan salahkan Kepala BRG-nya tapi salahkan Anggota Komisi IV DPR RI yang Badan Anggaran juga seharusnya anggarannya ditingkatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Rapat Kerja hari ini Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut mengenai tindaklanjut hasil pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat tanggal 4 Februari 2020 di maksud. Terutama terkait program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

Lebih lanjut kami minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut untuk menjelaskan secara umum realisasi APBN 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut.

Selanjutnya dalam kesempatan ini Komisi IV DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai isu-isu penting untuk ini, berupa hasil evaluasi serta rencana pencegahan pengendalian atas beberapa bencana kejadian terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan antarlain, banjir, longsor sampai awal tahun 2020. Bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2019. Kasus pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan, kasus impor sampah kertas dan plastik baik yang berijin maupun yang tidak berijin, karena saya dapat info lebih banyak yang tidak berijin.

Kemudian konflik satwa liar di Lampung nampaknya belum lama ini ada lagi gajah masuk. Pak Dirjen, gajah masuk desa lagi bukan ABRI masuk desa, ini gajah masuk desa lagi di Lampung dan mengakibatkan tolong nanti dicek salah satu penduduk warga yang ikut mengusir gajah infonya kecelakaan cukup fatal. Tolong nanti Kepala Taman disana suruh ninjau. Serta isu-isu

penting terkini lainnya, juga tolong nanti dijelaskan masalah yang berkembang diluar seolah-olah wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal perijinan dipindahkan ke BKPM. Juga yang terakhir masalah pemutusan hubungan kerja dengan WWF kalau tidak salah, itu juga isu yang teman-teman bertanya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Lingkungan Hidup serta Kepala Badan Restorasi Gambut untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut.

Dan kami persilakan, sebelum kami persilakan kami ucapkan juga selamat kalau tidak salah belum lama ini Presiden Jokowi memperpanjang kerja Badan Restorasi Gambut. Kalau tidak salah saya dapat infonya dari kantor sebelumnya.

Jdi silakan Ibu untuk waktunya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Shalom,
Om swasti astu.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,
Bapak dan Ibu yang hadir pada Rapat Kerja hari ini.

Kami juga menyampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas kesempatan ini dan terima kasih atas kesempatan undangan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK dan jajaran kehutanan dan lingkungan. Dan terima kasih atas arahan, bimbingan dan dukungan selama ini kepada KLHK.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Sesuai dengan surat undangan kami menyiapkan materi paparan, mohon maaf bukunya tebal banget sampai 248 halaman. Tetapi kami nanti ingin menyampaikan secara *highlight*. Kalau dilihat misalnya pada *screen 3* kami akan melaporkan tentang realisasi dan rencana kerja serta beberapa hal tadi setelah disampaikan oleh yang terhormat Pimpinan, mengenai banjir,

longsor, pengendalian Karhutla, penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, penanganan gambut, penanganan impor ilegal sampah, penanganan konflik satwa dan nanti mohon ijin kami menyampaikan over view sedikit, karena tadi sudah diumumkan oleh yang terhormat Ketua tentang Omnibus Law. Kemudian kami nanti juga akan menjelaskan tentang perijinan ke BKPM dan kaitan dengan WWF.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Pada screen 5 kita bisa lihat tentang realisasi anggaran ini juga saya kira mungkin sudah dibahas pada Rapat Dengar Pendapat yang lalu, bahwa secara umum, secara keseluruhan untuk LHK realisasi anggaran untuk tahun 2019 adalah 96,59% dari pagu anggaran Rp9.196.117.308.000,00. Masing-masing komposisi realisasi dan pagu mohon periksa pada halaman 5 di dalam dokumen.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Selanjutnya ijin kami melaporkan tentang rencana kerja LHK untuk tahun 2020. Arah pembangunannya tetap sesuai dengan rencana kerja Pemerintah sebagaimana telah diarahkan di dalam Undang-Undang APBN dan RKP, yaitu berkaitan dengan memperkuat ekonomi nasional, ekspor, langkah-langkah penataan regulasi, iklim usaha, pengentasan kemiskinan, kualitas lingkungan, pembangunan infrastruktur dan penguatan program penyerapan tenaga kerja serta penguatan pendidikan vokasi.

RKP tahun 2020 pada screen 8 mengambil tema peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas. Dalam hal ini, maka terdapat program prioritas nasional yang menjadi atau diberikan mandatnya kepada KLHK, yaitu pada prioritas nasional pertama menyangkut pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dalam kaitan pengentasan kemiskinan, yaitu prioritas nasional pertama dan juga prioritas nasional ketiga berkaitan dengan nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja dan pada prioritas nasional keempat berkenaan dengan ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup, menyangkut peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air dan kualitas lingkungan hidup.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Dengan demikian pada screen 9, itu terlihat bahwa rekap program untuk tahun 2020 prioritas nasional 5 itu 3 mandatnya kepada KLHK dengan 5 program prioritas, 11 kegiatan prioritas dan seterusnya sampai kepada proyek prioritas.

Di screen 10 mohon periksa juga bagaimana uraian atau distribusi program-program prioritas dan kegiatannya pada halaman 10. Selanjutnya mohon ijin kami melaporkan secara lebih rinci saya kira ini juga mungkin sudah dibahas di dalam Rapat Dengar Pendapat sudah dilaporkan oleh Bapak Sekjen kepada kami berkenaan dengan prioritas nasional. Pertama, pengentasan kemiskinan, dalam hal ini terkait dengan kegiatan prioritas reforma agrarian dan

perhutanan sosial. Jadi pada halaman 12 mohon periksa yang disebut kegiatan prioritas reforma agrarian dan perhutanan sosial meliputi kegiatan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), Perhutanan Sosial, pengembangan usaha untuk perhutanan sosial, pengelolaan secara kolaboratif dan sebagainya.

Bapak Pimpinan, saya ingin menambahkan bahwa pada akhir Desember 2019 dari target 4,1 juta hektar tanah objek reformasi agrarian yang diproyeksikan menurut RPJMN maka telah dicadangkan dalam peta TORA, yaitu 4,9 juta hektar. Dan dari target ini maka bisa mohon dilihat pada screen tidak ada dalam halaman tetapi kami memang sudah berkali-kali melaporkan di Komisi IV DPR RI bahwa dari 4,9 yang kita proyeksikan dari target 4,1 di RPJMN itu sudah disiapkan tanah objek reforma agrarian yang siap untuk dan sebagian sudah kita lepaskan yang dilakukan pada bulan September untuk wilayah Kalimantan. Sekarang masih terus berproses untuk pendistribusiannya kepada rakyat, yaitu 2,64 juta.

Selanjutnya di hutan sosial seperti kami juga beberapa kali melaporkan bahwa per 31 Desember dari 12,7 juta yang ditargetkan untuk keseluruhan secara ideal diproyeksikan sebetulnya pada 5 tahun kemarin 3,5 sampai 4 juta hektar dan realisasi tercapai 4,048 juta hektar bagi 818.457 kepala keluarga. Sebaran mohon ijin di dalam screen terlihat yang terbesar di atas 200.000 hektar misalnya di Aceh, Sumbar, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan. Provinsi-provinsi lain masih di bawah 200 ribuan hektar. Pada saat ini masih terus berkembang dan diproyeksikan akan lebih cepat lagi direalisasikan.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Selanjutnya mohon periksa pada halaman 13 berkenaan dengan kegiatan prioritas pada prioritas nasional yang ketiga, yaitu nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja yang meliputi kegiatan peningkatan nilai tambah ekonomi, kemudian produktifitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. Jadi disini terkait dengan industry berbasis hulu hilir dan peningkatan daya saing destinasi serta kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM.

Selanjutnya pada halaman 14, ini beberapa kegiatannya yaitu berkenaan dengan optimalisasi hasil hutan, kemudian termasuk pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, produksi hasil hutan bukan kayu dan lain-lain. Saya mohon ijin melaporkan secara *over view* bahwa sumber daya alam dan kawasan hutan ini sangat banyak. Jadi ada kayu, ada hasil hutan bukan kayu, ada fauna, air, jasa lingkungan dan lain-lain. Di sisi lain juga ada minyak, gas bumi, mineral dan bio thermal. Jadi di sisi lain jasa lingkungan termasuk ekowisata.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Saya mohon ijin melaporkan kinerja HTI sampai dengan Desember 2019 berkinerja baik 103, berkinerja sedang 57, sisanya relative kurang dan buruk.

Kami juga sudah melakukan pencabutan ijin beberapa HTI, karena tidak aktif dan berkinerja buruk. Di sisi lain ijin kami melaporkan HPH per Desember 2019 237 yang aktif dan yang tidak aktif ada 18.

Beberapa kebijakan untuk pengelolaan hutan produksi memang kami lakukan. Jadi penyederhanaan untuk investasi supaya lebih mudah dan perijinan. Kemudian optimalisasi pemanfaatan, jadi tidak hanya untuk kayu jadi pakai perijinan yang kompon. HTI atau HPH bisa juga dia tidak semata memanfaatkan kayu tetapi juga jasa lingkungan seperti eko wisata, getah dan sebagainya.

Kemudian disisi lain seperti tadi kami laporkan bahwa untuk TSL, tumbuhan dan satwa liar memang pada dasarnya ada ketentuan-ketentuan dilindungi, tidak dilindungi dan seterusnya. Terus kemudian ada sistemnya, jadi ada ketentuan boleh mengambil, boleh menangkap, boleh mengumpulkan, memelihara dan mengangkut. Jadi ada langkah-langkah itu, ada ketentuan menurut peraturan perundangan dan mohon ijin kita lihat di screen 23 langsung. Nilai ekspor tumbuhan dan satwa langka dan bio prospecting dari target 25 triliun itu tercapai menjadi Rp33,2 triliun. Jadi PNBP-nya juga Rp76,67 triliun, jadi ini nanti bila diperlukan data ini akan kami serahkan.

Apa saja jenis-jenisnya sampai dengan November 2019 terdapat 14 komoditi, yaitu koral, reptile, gaharu, ikan, antropoda, buaya, burung, mamalia, moluska, sonokling, pasak bumi dan lain-lain. Jadi memang ada potensi yang sangat baik disini. Negara mana saja yang membutuhkan ekspor TSL ini, yaitu Cina, Singapura, Saudi Arabia, Amerika dan Taiwan. Jadi secara rinci ada datanya.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Di sisi lain hutan kita juga punya potensi geo thermal yang besar di Indonesia, yaitu sampai dengan 29 giga watt. Jadi sekarang baru mencapai 1,5 giga yang dipakai jadi baru kira-kira 1400 atau 1500 mega watt. Jadi kalau kita bicara nanti energi terbarukan maka sebetulnya memang kawasan kita punya potensi geo thermal yang sangat baik dan ini masih terus kita dukung bagaimana regulasinya untuk investasinya berjalan tetapi tetap lingkungannya terjaga. Geo thermal ini sebetulnya kalau di hutan tidak pakai lahan yang banyak, dia perlu hanya untuk nyolok saja. Biasanya ijinnya mintanya paling di bawah 200 hektar. Ada yang cuma minta misalnya 60 hektar, jadi kecil sebetulnya. Karena dari sisi bukaan lahannya hutannya itu tidak banyak.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, saya hanya mengingatkan kalau tidak salah di Lampung Selatan itu ada geo thermal yang di Gunung Raja Basa. Jadi saya minta nanti petugas Direktorat Jenderal yang berkaitan dengan itu perihal penghijauan kembali sekelilingnya. Karena ini saya dapat info disana sudah mulai agak longsor. Berarti kalau longsor itu kan tanamannya sudah sangat berkurang

sekali, itu kalau tidak salah dekat wilayah yang belum lama kena tsunami, naik sedikit kalau tidak salah.

Silakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Terima kasih Ketua.

Tepat sekali sebab geo thermal ini memang berinteraksi langsung dengan ketersediaan air sehingga menjadi uap panas. Jadi pohon itu menjadi sangat penting nanti kami akan sampai kepada arah untuk agenda rehabilitasi hutan dan lahan kita.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Saya juga masih ingin melaporkan bahwa hutan konservasi kita sangat kaya, kita punya 54 taman nasional, kita punya 128 taman wisata alam yang secara nyata ekowisata itu terbentuk, karena pada dasarnya ketika pemandangan alam baik aksesibility jalan baik, maka lalu disitu berkembanglah ekowisata dan itu dalam 5 tahun ini berkembang sangat pesat.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Dalam kaitan wisata ini mohon ijin kami melaporkan bahwa 10 destinasi wisata prioritas yang sedang berkembang oleh Pemerintah dan terkait dengan kawasan ataupun daya tarik wisata alam, yaitu seperti di Danau Toba, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Likupang, Wakatobi, Morotai, Lesung Ujung Kulon, kemudian Borobudur, Bromo, Tengger, Semeru, Mandalika dan Labuan Bajo.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Selanjutnya mari kita mohon periksa pada halaman 15 berkaitan dengan kegiatan prioritas yang keempat, yaitu ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan. Jadi program prioritasnya berkaitan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas serta aksesibilitas air, penataan kawasan hutan, pemeliharaan pemulihan dan konservasi, kemudan Citarum Harum selain juga pengendalian, pencegahan, dan pengendalian penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan dan kelembagaan.

Pada halaman 16 dan 17, pada halaman 16 mohon periksa terkait dengan peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air, yaitu berkenaan dengan perencanaan ataupun penguatan fungsi KPH, pengelolaan kolaboratif dan juga pemeliharaan pemulihan rencana pengendalian kerusakan perairan darat, penataan kawasan hutan dan sebagainya.

Pada halaman 17 mohon periksa, berkenaan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yaitu kelengkapan laboratorium, penanggulangan pencemaran, seperti penyediaan fasilitas pengolahan limbah, pemantauan sampah laut, kemudian penanganan penguatan kelembagaan dan sebagainya.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Pada kesempatan ini kami mohon ijin melaporkan tadi selaras dengan yang ditanyakan oleh yang terhormat Ketua, berkenaan dengan tanah longsor, kemudian kondisi hutan yang semakin buruk. Kalau kita lihat datanya pada tahun 2015-2019 memang upaya-upaya kita untuk RHL itu relative kurang. APBN di waktu yang lalu hanya menyediakan kira-kira 23.000 sampai dengan 25.000 hektar per tahun. Tetapi di tahun 2019 atas dukungan Komisi IV DPR RI dan Komisi VII DPR RI pada saat itu diberikan dukungan dana yang sangat besar meningkat. Sangat besar dalam arti relative meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi kalau bicara kebutuhan yang sebenarnya sebetulnya masih relative jauh.

Jadi dalam kaitan itu maka orientasi penanaman itu dilakukan untuk, pertama melindungi danau, kemudian melindungi DAM dan Waduk, melindungi atau mencegah wilayah banjir dan longsor, mengatasi lahan kritis, baik di hutan maupun diluar kawasan hutan dan juga menjaga bahan baku kayu dan mengakomodir cara hidup masyarakat yang suka menanam dan menabung dari tanaman kayu.

Oleh karena itu, sejak tahun lalu KLHK memprogramkan gerakan tanam nasional baik melalui APBN, rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut, pemulihan wilayah bencana, pemulihan Karhutla, maupun yang dilakukan oleh korporasi, misalnya merehabilitasi DAS dari perijinan, apakah itu di HTI, di HPH, dan juga dari CSR swasta. Dan selain itu juga masyarakat melakukan melalui misalnya perhutanan sosial. Dan kita juga menyaksikan bahwa ada dinamika dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Saya mohon ijin untuk RHL ini bisa melakukan elaborasi karena kondisi lingkungan kita yang sudah berat seperti kasus di Sukajaya, Bogor dan Lebak kemarin itu membuka mata kepada kita dan sebelumnya juga ada di Konawe, di Bengkulu, di Jenebrang dan lain-lain yang bisa menunjukkan bahwa keadaan kita sudah cukup kritis.

Minggu lalu kami bersama Bapak Presiden melihat secara langsung sebagai contoh di Gajah Mungkur. Kita berada di titik yang dekat panah itu, kemudian dibawahnya mulut Waduk Gajah Mungkur. Itu DAM itu kira-kira 8.800 hektar luasnya. Kemudian areal yang merah itu adalah sub-sub DAS y ada 10 dan yang paling besar adalah yang kedua, yaitu yang ada tanda panah sebelah kanan atas dengan pola drinase yang sangat rapat. Kalau drinasenya sangat rapat itu artinya apa? Itu artinya kebelah-belah gitu bukitnya. Jadi sebetulnya relative sangat rawan. Terjadi desimentasi 3,2 juta meter kubik per

tahun untuk DAM ini. Dan dari Keduang dari panah kanan atas itu sendiri 1,2 juta meter kubik per tahun. Kalau tidak diapa-apain misalnya dalam 2 tahun maka DAM akan keisi penuh oleh pasir dan batu-batu kecil sedalam 8 meter.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Saya mohon inin menjelaskan ini dan mohon dukungan, kelihatannya RHL kita untuk penanaman pohon dan mengatasi wilayah-wilayah sulit seperti ini, ini sangat banyak. Kejadian rusak-rusak seperti ini di Lebak kemarin, Lebak dan Bogor lebih dari 100 titik mahkota longsor. Kita lihat gambar paling kiri atas itu namanya mahkota longsor. Dan di Gajah Mungkur kemarin satu RT itu 3 titi yang seperti itu, satu RT itu luasnya cuman mungkin tidak nyampe 40 hektar.

Jadi kondisi ini relative sangat berat, oleh karena itu kami di perintahkan oleh Bapak Presiden melangkah langsung di lapangan untuk langkah-langkah rehabilitasi hutan dan lahan ini secara nyata tetapi sekaligus konkrit menyelesaikan masalah, jadi bukan yang potongan kecil-kecil. Jadi ada ternyata dilapangan kita bisa lihat tidak mungkin hanya menanam tanpa mendukung dengan bangunan konservasi tanah dan air. Jadi ada DAM-DAM penahan galiplak.

Ada DAM Pengendali yang biayanya besar itu biasanya di PU. Jadi infrastruktur yang dananya besar di PU, kalau DAM Penahan ini paling biayanya 30 jutaan dan swakelola oleh masyarakat. Jadi sambil memperbaiki longsor menjaga psikologi masyarakat yang sedang mengungsi, karena kan masyarakat kalau mengungsi mungkin 2 hari tidak apa-apa, 3 hari tidak apa-apa, tapi kalau sudah 2 minggu. Oleh karena itu, ini diajak bekerja untuk membangun galiplak DAM Penahan, sekaligus membangun kebun bibit, lalu menanam dan Bapak Presiden mengarahkan untuk kita melakukan penanaman vetifer.

Vetifer ini tanaman khusus rerumputan atau sejenis akar wangi yang akarnya sangat dalam. Beberapa Gubernur termasuk Jawa Timur sudah mulai menanam, kita juga terus menerus melakukan penanaman ini di titik-titik yang sangat rawan, titik-titik curam.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Kembali kepada dokumen Bapak dan Ibu yang terhormat. Di halaman 18, maka pada tahun 2020 pagu anggaran KLH sebesar Rp9.006.330.291.000,00 dan dengan BRG berarti menjadi Rp9.319.325.816.000,00 terdiri dari konfigurasi program-program pada structural eselon I, yaitu 13 unit.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Saya pada kesempatan ini mohon dukungan. Kami akan melaporkan kepada yang terhormat Bapak Presiden bahwa nanti dalam laporan kami telah meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI, yang terhormt Pimpinan dan

Anggota. Bahwa rehabilitasi hutan dan lahan itu tidak bisa kita tahan lagi, jadi harus didukung sehingga dana Rp 9 triliun ini sangat-sangat jauh dari kebutuhan. Kita sudah coba exercise kebutuhan untuk penyelesaian secara keseluruhan areal-areal yang sulit tadi itu kira-kira 14 jutaan hektar itu membutuhkan dananya lebih kurang Rp78 triliun yang bisa diselesaikan sampai selesai. Artinya, kalau kita mau selesaikan dalam 5 tahun maka per tahunnya kira-kira paling tidak dibutuhkan tambahan Rp14 triliun lagi. Kami akan mencoba meyakinkan Bapak Presiden bahwa kita sudah membutuhkan ini untuk diselesaikan.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Selanjutnya pada screen 19 itu kelihatan distribusi dari anggaran KLH untuk keperluan belanja pegawai operasional dan belanja non operasional yang dipakai untuk pencapaian target kinerja KLH, yaitu pada screen 21 sebesar Rp6.517.862.351.000,00 jadi kalau dilihat data ini kita lihat selanjutnya di halaman 22 pada dokumen di hadapan yang terhormat Ibu dan Bapak, yaitu untuk prioritas nasional. Jadi output-nya programnya itu terlihat di screen 22 mencakup nilai anggaran sebesar Rp4.909.449.585.000,00 Jadi itu gambaran tentang anggaran.

Selanjutnya iijinkan kami melaporkan beberapa isu actual, yaitu menyangkut banjir dan longsor. Bapak Pimpinan, pada halaman 23 di dokumen dihadapan yang terhormat Ibu dan Bapak sekalian. Kita kalau lihat cerita banjir pada Maret 2019 di Sentani Jayapura itu mohon periksa pada halaman 26. Kita lihat daerah dampak banjir dan daerah tampung airnya pada halaman 27 dan 28. Itu perubahan penutupan lahan sebetulnya tidak terlalu signifikan, hanya 3,3%. Tapi karena dia tajam kemudian ada curah hujan lalu terjadilah longsor dan diikuti selanjutnya dengan banjir pada halaman 31, 32. Dan dengan peristiwa itu pada halaman 36 KLHK bersama-sama Direktorat Jenderal PDASAL dan KSDAE terus itu melakukan upaya pemulihan pada cagar alam siklop dan pada wilayah hutan produksi, yaitu pada titik-titik yang merah.

Selanjutnya kalau kita lihat yang kasus kemarin Januari di Bogor, mohon ijin kami melaporkan. Ini yang di Sukajaya, jadi model longsornya seperti ini, kalau dilihat sangat terjal, ini namanya mahkota longsor dan ribuan titiknya yang seperti ini. Ada kemarin di Lebak dan di Bogor, itu harus ada dan kita sudah lakukan sejak tanggal, saya dipanggil Bapak Presiden tanggal 6 Januari kita mulai mengerjakan pekerjaan lapangan itu tanggal 16 Januari dan terus kita sambil buat bangunan, sambil juga menanam pohon. Jadi ada langkah-langkah operasinya. Kalau kita lihat di halaman 43 ini tutupan lahanya, kemudian dan seterusnya ini gambaran lahan kritisnya. Kemudian terus ini limpasan airnya, ini wilayah terdampak.

Nah, kalau kita lihat cross section kemarin yang di Bogor dan Lebak itu kira-kira terjalnya seperti itu. Begitu medannya itu perbukitannya seperti gambar hijau yang disebelah kiri bawah. Jadi visualisasinya kira-kira seperti itu, lalu yang dilakukan oleh KLHK kemudian adalah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dengan engineering yaitu tadi bangunan konservasi tanah

dan air dan vegetative, ini lokasinya, ini medannya kemarin dan itu kurang lebih sebelah kiri adalah sebelum penanganan, di sebelah kanannya sesudah penanganannya.

Terus ini gambar-gambar bangunannya yang mulai dikerjakan pada tanggal 16 Januari. Terus, ini juga situasi dilapangannya terus dikerjakan, terus ini galiplaknya juga di satu tempat ini kita buat 2 atau 3 begitu ada pakai bamboo, ada pakai beronjong kawat. Ada yang baik disitu, karena dikerjakan oleh masyarakat, beronjong kawatnya diisi batu dan harga beronjongnya satu meter Rp230 ribu. Jadi rakyat yang menganyam tapi ada juga yang dari pabrik. Kemudian harga batunya Rp220 ribu, ngupahnya juga dibayar, kemudianangkutnya juga dibayar Rp80 ribu. Jadi untuk padat karya dan untuk mengatasi kegiatan mereka di pengungsian ini relative menolong.

Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon dukungan dari yang terhormat Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota untuk kita bisa melakukan rehabilitasi hutan dan lahan ini secara besar-besaran karena medannya memang sangat-sangat berat.

Selanjutnya ijin kami melaporkan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pada halaman 78. Data menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015 2,6 juta dan pada tahun 2019 1,59 juta. Jadi ini memang meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi sebetulnya masih lebih rendah dari tahun 2015. Tapi kalau kita lihat sejarahnya dari tahun 80-an maka sebetulnya pada tahun 1997, 1998 juga sampai 11 juta yang kebakar. Jadi memang ada peristiwa yang sudah sangat panjang dan kita belajar selama 5 tahun ini kita perbaiki sistemnya.

Oleh karena itu, mohon periksa pada halaman 79 ini terus kita ikuti hotspot dengan instrument satelit NOA dan TERA. Dua-duanya kita pakai, kenapa? Karena yang NOA ini kesepakatan kita di negara-negara Asean, kalau yang TERA ini yang lebih detail dan rinci. BMKG kita juga mengikuti, LAPAN dan sebagainya. Jadi dengan instrument yang sangat baik. Disini data perkembangan hotspot-nya kelihatan perbandingannya di halaman 80. Jadi pada tahun 2018 hotspot-nya di TERA misalnya hanya 9000 tahu-tahu di tahun 2019 menjadi 29.300 titik.

Selanjutnya di halaman 81, seperti yang kami laporkan tadi luas kebakaran dan ternyata berdasarkan citra satelit luas ini juga ada yang terkait dengan lahan gambut yang terbakar. Jadi di Kalteng lahan gambut terbakarnya 37%, di Sumsel 28%. Ini datanya.

Terus apa yang penting disini bahwa pada tahun 2015 transborder ... Asap lintas batas ke Singapura dan Malaysia itu sampai 60 hari di 2015. Kita kerja keras, kemudian di 2016 tinggal 14 hari, pada tahun 2017 tinggal 2 hari. Tahun 2018 tidak ada transbon rehais tetapi pada tahun 2019 kemudian terjadi transbon rehais mulai tanggal 11 September kalau tidak salah sampai tanggal 20 sekian, 8 September. Jadi ada antara akhir Agustus-September itu rata-rata selama 5 tahun itu munculnya transbon rehais itu disana. Bapak Presiden memerintahkan untuk terus dilakukan pencegahan.

Beberapa penyebab Karhutla mohon periksa pada halaman 86 dan kalau kita lihat *outlook* iklim untuk tahun 2020 kelihatannya menurut data ini bisa lebih basah, jadi tidak sekering 2019. Apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah selama dalam kaitan Karhutla ini, mohon periksa pada halaman 94 dan juga bagaimana komposisi daerah operasinya Manggala Agni, yaitu unit KLHK di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang menangani atau penjurur lapangan untuk penanganan Karhutla pada Kementerian LHK.

Upaya yang dilakukan terutama mohon periksa pada halaman 95 kalau di screen 79, yaitu dengan deteksi dini. Jadi ini cara mencegahnya kemudian rutin dilakukan deteksi dini, monitoring hot spot dan juga patroli terpadu. Jadi apakah KLHK dan juga dukungan dari dana siap pakai BNPB juga melakukan dukungan patroli.

Ada yang masih menjadi persoalan Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat. Saya meskipun sama-sama Menteri dari Nasdem, kami masih terus berkomunikasi ternyata masih punya persoalan kita di bagian penyiapan lahan tanpa bakar. Maka dalam hal ini sebetulnya yang perlu paling berperan banyak adalah kawan-kawan di pertanian. Sebab kebutuhan masyarakat untuk membuka lahan kalau dia tidak boleh buka dengan api, kan harusnya ada sarana lain apakah mekanisasi atau sarana-sarana yang lain atau alternative lain.

Meskipun demikian dengan dana yang kecil KLHK sih mencoba-coba juga tapi nanti di pertanian kelihatannya harus dibanyakin dukungan untuk penyiapan bagi lahan-lahan rawan Karhutla dengan pengolahan lahan tanpa bakar. Kampanye terus dilakukan sebetulnya nanti apabila yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota dan tentu saja Pimpinan ke lapangan. Sebenarnya ada dana bagi hasil hutan, dana DBHDR yang bisa dipakai. Beberapa daerah itu punya DBHDR yang besar-besar, misalnya Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah itu besar-besar DBHDR-nya. Tapi kelihatannya Kepala Daerahnya masih ragu. Oleh karena itu, mohon dukungan Bapak dan Ibu para yang terhormat Anggota, untuk misalnya Aceh, Sumut, Riau, Sumsel, Jambi, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Papua, NTB, Sulsel, Sulut, Sultra, itu bisa menggunakan DBHDR karena Peraturan Menteri Keuangannya sudah ada begitu. Jadi jangan ragu-ragu karena pada dasarnya ini bisa dipakai.

Selanjutnya pada halaman 102 kita bisa lihat ini ada korelasi juga sebetulnya jumlah hot spot dengan water boombing dan tehnik modifikasi cuaca. Jadi kalau lihat kelakuan Karhutla di tahun 2019 kemarin, maka sebetulnya selain monitoring hot spot dan patroli itu tehnik modifikasi cuaca itu akhirnya yang paling ampuh. Jadi artinya kita harus merekayasa kapan dari situasi awan yang ada itu bisa diturunkan hujan. Memang ada syarat-syarat tertentu pasti alam tidak bisa kita rekayasa tetapi kondisi alam bisa kita kelola begitu, jadi kurang lebih seperti itu.

Kemudian KLHK juga semakin mendorong untuk penguatan desa sebagai pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian pada halaman 111 dapat dilihat bahwa dari 21 provinsi yang secara umum rawan karhutla itu bisa dilihat sebanyak 4.140 desa yang rawan dan untuk tahun 2020

kita targetkan penanganan di 1.200 desa. Jadi ada datanya Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Kalbar dan seterusnya pada halaman 111 pada dokumen di hadapan yang terhormat Ibu dan Bapak sekalian.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,
Pimpinan yang kami hormati.

Kami mencoba berinteraksi secara langsung dengan para gubernur dalam diskusi bilateral. Ternyata dan nanti mohon dukungan juga kepada mungkin melalui fraksi atau komisi yang lain ternyata memang ada korelasi antara desa-desa yang kebakaran dengan desa-desa yang kuat, misalnya desa swakarya, desa swadaya. Oleh karena itu, Kepala Daerah mengatakan sebetulnya diperkuat saja desa-desanya dan itu adanya di Komisi II DPR RI atau di Komisi V DPR RI atau juga di Komisi-Komisi yang punya sarana banyak seperti pertanian dan lain-lain.

Jadi kalau di kita bilang 200, misalnya di kita bilang 1.200 desa menurut Pemda harusnya bisa 2.572. Jadi pemda sendiri dengan program pembangunan desa, kemudian dana desa dan lain-lain juga memberikan dorongan dan dukungan untuk ini. Komunikasi kita dengan Menteri Desa juga cukup baik dan sudah ada agenda-agenda dana desa untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,
Pimpinan yang kami hormati.

Itu terkait dengan Karhutla.

Selanjutnya ijin kami melaporkan tentang kerusakan lingkungan....

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, saya tadi melihat Ibu mengatakan ada dana bagi hasil dan reboisasi yang tidak digunakan oleh Kepala Daerah. Kalau saya lihat selama ini kebakaran seolah-olah bukan menjadi tanggungjawab kepala daerah. Semua hampir tempat yang bermasalah itu seolah-olah itu bukan kewajiban saya, itu kewajiban Kementerian Kehutanan. Padahal belum tentu lokasi yang terbakar itu dilokasi kehutanan, bisa jadi di lokasi perkebunan. Coba kita lihat visi dan misi seorang Bupati, seorang Gubernur tidak ada yang ngomong nanti kita adakan begini untuk pencegahan kebakaran hutan tidak ada, yang ada janji-janji setinggi langit, pencapaiannya Cuma sebatas kaki bukit.

Coba kita lihat nanti hal ini juga akan saya laporkan kepada Fraksi saya, bahwa ini banyak yang seolah-olah tutup mata tidak mau tahu. Coba kita lihat postur anggaran pendapatan belanja daerah, sesuai dengan Undang-Undang Hutan Lindung di bawah provinsi, coba kita lihat hampir semuanya minim sekali. Tadi juga masukan yang bagus tadi mengenai buka lahan tanpa bakar. Ini untuk menjadi perhatian juga teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI bila pulang ke Dapilnya sampaikan masalah ini. Tapi saya juga minta kepada Ibu Menteri untuk kami dibuatkan brosur, apabila membakar hutan ini, bakar sedikit menjadi lebih luas, efeknya apa, kekurangannya apa.

Satu hal yang paling menarik hari ini Ibu Menteri, Ibu Menteri tidak dijagain oleh Anggota Nasdem, Cuma Bapak Abdullah Tuastikal yang paling rajin tiap hari datang yang lain tidak sayang sama Ibu. Karena dianggapnya Ibu, Ibu tidak dijagain juga tetap aman, tapi kalau dua hari lalu wajib sampai BKO Ibu. Yang BKO memang tidak ada Ibu, termasuk juga yang Pimpinan sebelah saya juga tidak datang ini Bu, harusnya sesama kolega kan harus tetap menjaga. Ini hanya guyonan saja Ibu, bahwa inilah yang terjadi di Komisi IV DPR RI, seharusnya di Komisi IV DPR RI ini sudah tidak ada bicara fraksi, yang kita bahas ada Fraksi Komisi IV DPR RI.

Silakan Ibu, dilanjutkan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Terima kasih Ketua.

Betul sekali, bahwa sebetulnya kebakarannya juga banyaknya di areal penggunaan lain. Karena yang di hutan, yang di HTI-HTI itu semakin kita kontrol, kalau tidak ya terpaksa dicabut ijinnya misalnya begitu. Dan betul sekali bahwa pembukaan lahan tanpa bakar ini perlu disosialisasikan betul, perlu diberikan fasilitasi, karena harganya jauh beda. Kalau lahan tanpa bakar itu paling habisnya kira-kira Rp800 ribu per hektar, tapi kalau pakai peralatan, sistematis, rapi itu sampai Rp8 juta sampai Rp10 juta. Jadi memang jauh sekali selisihnya. Oleh karena itu, terima kasih atas catatan yang terhormat Bapak Ketua.

Selanjutnya, kami mohon ijin untuk melaporkan....

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, masalah apa?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Mau itu tadi Pimpinan yang masalah tanpa bakar sama bakar tadi. Mohon diulangi berapa anggaranya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Bukan anggaran, kalau masyarakat itu buka lahan tanpa bakar itu Rp800 ribu biayanya.

KETUA RAPAT:

Kalau itu modalnya Cuma bensin.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Kalau dia membakar?

KETUA RAPAT:

Modalnya bensin sama korek api.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Kalau dia membakar itu Rp800 ribu tapi kalau sistematis dicangkul, dibuka-buka begitu, mekanisasi dan lain-lain itu bisa sampai Rp8 juta sampai Rp10 juta.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,
Pimpinan yang kami hormati.

Saya sedih sebetulnya melaporkannya yang susah-susah mulu ini. Mohon ijin kami ingin melaporkan bagian yang relative berat juga, yaitu berkenaan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan karena aktifitas pertambangan. Kemarin peristiwa Lebak dan Bogir itu memperkuat tekad Bapak Wapres dan Bapak Presiden untuk masuk ke persoalan ini dan kita harus selesaikan.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,
Pimpinan yang kami hormati.

Pada halaman 114 itu mohon periksa, bisa sudah diidentifikasi kegiatan pertambangan berijin 7.464 ijin usaha pertambangan. Dan disisi lain ada tambang tanpa ijin sebanyak 8.683 titik. Jadi dari sini sebetulnya banyak persoalan.

Kemudian kita bisa lihat selanjutnya pada halaman 115 provinsi dengan ijin yang paling bermasalah itu seperti di Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Kaltim, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Kemudian kita lihat dari bukaan lahan dan reklamasi sampai 2018 itu lahan yang sudah dibuka untuk tambang 146.545 hektar yang direklamasi baru 59.903 hektar.

Beberapa kerusakan di dalam aturan kami sampaikan seperti Sumsel halaman 117, di Kalbar halaman 118, Kalimantan Tengah halaman 119, kemudian Kalimantan Selatan halaman 121, Kalimantan Utara halaman 122, Nusa Tenggara Barat halaman 123, Sulawesi Tenggara halaman 124, Bangka Belitung 125, Kalimantan Timur halaman 126. Di Kaltim ini yang paling mencuat, paling mengemuka masalahnya karena disitu sampai ada anak yang meninggal, sampai 36 orang korban areal bekas tambang. Oleh karena itu, memang KLHK mencoba untuk melihat dari aspek lingkungannya. Ada masalah kemarin waktu KLHK ingin menyelesaikan, kami bersama-sama KPK karena pengaduannya banyak ke KPK, Komnas HAM juga, dan ternyata menurut KPK tidak bisa kalau KLHK yang membiayai pakai APBN. Karena

itukan pekerjaan bekas orang-orang swasta dan lain-lain kok yang merapikan harus APBN. Oleh karena itu, kita memang meminta dukungan dari swasta terdekat disitu untuk membantu membangun atau merapikan di 3 lubang sebagai contoh.

Kemudian sebetulnya di halaman 131 pelaksanaan reklamasi pasca tambang dan juga rehabilitasi itu sudah ada Peraturan Pemerintah-nya, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. Jadi sebetulnya kewajiban ini ada tetapi dia hanya bagus yang diijin-ijin yang ditangani langsung oleh Menteri ESDM itu lebih kurang 100 ijin lebih dari 100 ijin tapi itu tingkat reklamasinya bisa sampai 90% lebih kepatuhannya, ketaatannya. Tapi kalau yang menjadi kewenangan provinsi itu kepatuhannya sangat rendah, kayaknya hanya 30% sampai 40% saja.

Ada problem disini, yaitu berkaitan dengan perijinan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kalau yang di Kehutanan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, tentang Pemda itu menyatakan bahwa kewenangan tambang dan hutan dari Kabupaten itu ditarik ke Provinsi. Nah, untuk Kehutanan waktu itu dengan situasi ini pada tahun 2015 kami cepat-cepat mengatasi dengan membentuk UPT-UPT Dinas teknis provinsi, sehingga data yang kabupatennya cepat diambil, dirapikan. Tapi yang ditambang kelihatannya tidak keburu diberesin sehingga dokumen-dokumen perijinannya itu provinsi kehilangan data kelihatannya, itu kami sudah diskusi dengan beberapa provinsi.

Jadi ini dalam kaitan ini, maka kemarin rapat di tempat Bapak Wapres dan diperintahkan kepada beberapa Menteri untuk menyiapkan langkah-langkah yang sistematis melalui Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden menyelesaikan masalah ini. Di KLHK terkait dengan ini kita ambil contoh yang di Bogor dan Lebak, yaitu untuk penanganan penambangan tanpa ijin atau PETI. Jadi sudah dilakukan penelusuran ini cukup berat medannya, oleh tim Gakkum di 7 titik dengan jalan kaki sampai 6-8 jam setelah naik mobil kemudian naik motor 4 jam sudah itu habis naik motor terus harus jalan kaki lagi 6-8 jam ke puncak itu diperoleh bahwa ada fakta lapangan berupa lubang tambang tanpa ijin 411, dengan pondok kerja 1.119 dan peralatan galundung di screen berikutnya 111 2.400.

Terus di screen 113, kita lihat mohon ijin di dokumen yang Bapak dan Ibu sekalian di halaman 142. Nah, ini medannya seperti ini kurang lebih puncak tinggi sekali di atas itu, tim Pak Roy turun kesana itu kurang lebih seperti itu di Resort Cisoka, kemudian di Cibeduk terus satu lagi. Jadi medannya memang cukup berat. Arahan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita akan menutup tambang-tambang tanpa ijin karena relative berat. Itu satu lubang mungkin orang yang masuk itu 20-30 sampai bisa 60-80 orang. Jadi dari unsur kemanusiaan juga agak serem, karena begitu orangnya masuk kemudian dikunci dari luar tidak boleh keluar lagi. Karena kalau dia keluar nanti dia mencuri emas yang didapat, gitu kira-kira. Jadi memang agak serem, oleh karena itu memang sudah harus ditutup tempat-tempat seperti ini. Gakkum sendiri sebetulnya sudah melakukan juga operasi penertiban pada halaman

144 dan 145, dan sudah ada perkara-perkara yang ditangani, misalnya total operasi 91 di halaman 144. Dan penanganan perkara sampai dengan P21 sebanyak 44.

Kemudian yang tentang gambut, kami hanya ingin melaporkan bagaimana evolusi dari penanganan gambut pada halaman 147. Kemudian apa saja masalah utamanya nanti Kepala BRG akan menyampaikan beberapa hal saya kira. Dan apa masalah utamanya gambut, kering, kebakaran hutan dan sebagainya ada subsidi di halaman 148. Kemudian yang paling penting di halaman 149 bahwa Peraturan Pemerintah Tahun 1971 yang kemudian di koreksi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 setelah peristiwa besar tahun 2015, yaitu menyangkut inventarisasi, penataan fungsi ekosistem pada halaman 149, rencana perlindungan dan pengelolaan, kriteria baku serta larangan dalam pemanfaatan. Jadi ada penetapan KHG, kawasan hidrologis dan fungsi ekosistemnya. Ada yang penting, yaitu untuk mengukur tinggi muka air tanah sebab gambut itu kunci utamanya hanya satu, yaitu bahwa dia harus selalu basah. Kalau dia basah itu aman.

Kemudian apa yang terjadi dengan gambut. Di dalam halaman 150, 151, 152, itu langkah-langkah yang dilakukan. Dan di halaman 155 kami ingin melaporkan langkah-langkah terhadap pengendalian kepada pemegang ijin. Jadi jumlah perusahaannya, pemulihannya sudah dilakukandi 68 HTI dan di 212 perkebunan. Kewajiban untuk dipulihkan seluas 3,4 juta hektar. Kemudian ada peristiwa suksesi alami dan ada yang mereka harus lakukan rehab dengan revegetasi.

Kalau kita lihat misalnya terus di halaman 157 Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kita mewajibkan para pemegang ijin untuk mengendalikan wilayahnya, jadi kalau kita lihat lagi datanya di halaman 158, itu kalau dilihat garis-garis yang reguler maka kelihatan bahwa hot spotnya kebanyakan sudah diluar konsesi. Jadi artinya ada ketaatan yang mereka lakukan. Jadi kita lihat yang halaman 162 misalnya, itu di antara celah-celah di antara areal berijin itu terjadi kebakarannya. Jadi memang di areal yang disebelah luar.

Kita lihat lagi di halaman 163 di screen saya 130, itu kelihatan rata-rata diluar kenanya. Dia di 164 makin jelas, ini kelihatan sekali bahwa dia memang akhirnya yang kebakar tinggal yang diluar-luar. Oleh karena itu, menjadi sangat penting peran Badan Restorasi Gambut untuk bertanggungjawab diluar areal konsesi. Karena kalau yang diareal konsesi kita minta pertanggungjawaban swasta sambil kita kontrol kalau ngaco ijinnya kita cabut. Kira-kira seperti itu pendekatannya.

Bapak dan Ibu, Pimpinan yang kami hormati.

Selain itu BRG juga melakukan banyak kegiatan di lahan masyarakat nanti biar Bapak Nazir. Dan bagi di KLHK di halaman 169 kita tidak bisa dihindari ternyata masyarakat kita juga ada di kawasan gambut. Di halaman 169 itu misalnya di Riau, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Maluku Utara, Papua, Kalsel, Kalteng, Sumsel, Jambi itu ada sejumlah kelompok-kelompok perhutanan sosial yang wilayahnya gambut. Jadi ini memang harus kita

fasilitasi dan harus kita asistensi dengan baik. Jadi mohon periksa nanti pada halaman berikutnya.

Bagian yang kelima, yaitu tentang impor secara ilegal sampah. Sebetulnya di halaman 174 itu tidak, inikan yang terjadi adalah impor scrap kertas dan scrap plastik sebagai bahan baku industry. Tidak ada masalah dengan itu, ijinnya juga boleh tapi masalahnya adalah ternyata ada campuran limbah dan sampah di dalamnya. Jadi yang terhormat Bapak Pimpinan, saya kira sudah kelapangan kami over view saja di halaman 176, 177, ini contoh-contohnya sepatu bekas, minyak pelumas, aki bekas, ban bekas, kemudian terus ada bekas suntikan, ada limbah medis, bekas obat dan sebagainya ini yang dijadikan persoalan itu ini, yang tidak boleh itu ini.

Demikian pula scrap kertas yang ada selang infus dan sebagainya, menurut dasar hukum ada larangannya. Yang terhormat Pimpinan, sudah mempertegas saya kira sikap dan kami sangat menghargai itu. Terima kasih atas dukungan Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Anggota Komisi IV DPR RI. Kami juga mengikuti perkembangannya melalui laporan Dirjen dan di media. Di halaman 187 memang kan persoalannya ada di supervisi dan di survey dan pemeriksaan. Jadi saya kira ada arahan dari yang terhormat Pimpinan.

Selanjutnya, container yang telah diperiksa, jumlah container yang telah diperiksa dan direkspor, mohon periksa pada halaman 188 dan 189. Tentang kebijakan pengelolaan sampah sendiri, kami juga sampaikan dalam dokumen itu. Dalam dokumen sudah ada kebijakannya dan regulasinya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Saya mohon ijin untuk melaporkan ini saya minta maaf lagi-lagi melaporkannya yang susah-susah, di halaman 195. Kita cukup ambisi, cukup ambisius ketika tahun 2025 kami berpikir bahwa bisa mengurangi sampah sampai 30% atau menanganinya sampai 70%. Tapi ternyata yang kondisi sekarangnya masih berat. Walaupun dalam 5 tahun terakhir ini sebetulnya antusiasme masyarakatnya sangat besar. Tapi, ada tetapnya antusiasme masyarakat tanpa fasilitasi Pemerintah kan jadi sulit. Fasilitasnya relative tidak ada, di waktu yang lalu dana untuk lingkungan itu sangat kecil. Kalau dana kehutanan kira-kira perbandingan Rp5 triliun banding Rp800 miliar. Ketika digabung kami mulai membagi, tapi ternyata dalam perjalanan 5 tahun kemarin lingkungannya tidak keangkat dukungan anggarannya.

Jadi banyak hal yang sebetulnya di masyarakatnya berkembang sangat baik, animonya partisipasinya sangat tinggi, tapikan fasilitasnya itu yang relative lemah. Oleh karena itu, tadi minta maaf saya sekali lagi selain RHL yang harus didongkrak kelihatannya persoalan penanganan sampah ini juga kita harus dongkrak juga. Terpaksa lagi kami memohon dukungan untuk penambangan anggaran pada bidang lingkungan ini, pada bidang pengelolaan sampah ini.

Meskipun demikian sebetulnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah. Kami kemarin dipanggil DPD RI Komite II mereka

menyiapkan RUU inisiatif untuk revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah. Kita Pemerintah tidak punya proyeksi itu, tapi saya kira nanti tentu setelah DPD RI akan masuk ke Komisi IV DPR RI juga. Sebetulnya Undang-Undang Nomor 18 itu menekankan sangat banyak peran Pemda untuk penanganan sampah. Tapi kita sangat maklum bahwa dia cost center, bahwa biaya terus, biaya terus, Pemda-nya tidak dapat apa-apa.

Di Pemerintah penanganan sampah ini ada beberapa macam. Yang besar-besar di tempat pembuangan akhir, kayak di Balikpapan kemarin atau di Banjar Baru itu dananya besar sekali. Membangun tempat pembuangan akhir sampah yang di Balikpapan itu Rp200 juta lebih, mungkin Rp250 juta atau Rp270 juta, eh miliar. Yang di Banjar Baru kemarin Rp149 miliar, yang itu bagiannya PU Bapak dan Ibu, Pimpinan yang kami hormati. Itu bagian PU, tapi kalau yang kecil-kecil yang kapasitas misalnya 20 miluar atau 6 miliar itu bangunan-bangunan di KLHK. Jadi pembangian tugasnya, fisik prasarananya di PU, tetapi yang berbicara dengan budaya, attitude, sosialisasi itu adanya di KLHK.

Nah, kita bersyukur bahwa beberapa Pemda itu sudah punya keinginan yang sangat kuat misalnya DKI, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Malang, Cimahi, Bandung, Depok, Padang, Kota Bogor dan Kota Makassar itu sudah punya inisiatif dan sudah punya kinerja yang baik. Jadi pada saat ini di halaman 200 sudah ada 21 provinsi dan 350 kota yang sudah memiliki rencana kebijakan untuk penanganan sampah.

Jadi bagaimana perkembangannya, bagaimana posisi open dumping, open dumping itu sebenarnya menurut Undang-Undang sudah harus dilarang, tapi masih terdapat di beberapa daerah bagaimana kolaborasi mohon diperiksa pada halaman 203 sampai dengan halaman 206. Apa yang penting disini, animo dan partisipasi masyarakat itu juga kelihatan dengan adanya bank sampah yang cukup progressing di halaman 208.

Pada tahun 2014 itu hanya ada 1.172 bank sampah dan pada tahun 2018 sudah mencapai 7.488 bank sampah. Kemudian Pemerintah juga memfasilitasi untuk *ways to energy* untuk 12 kota. Tetapi sudah sejak tahun 2017 sampai sekarang rasanya belum bisa rapi-rapi, belum selesai juga. Berbagai persoalan yang ada terkait dengan daerah itu mohon diperiksa pada halaman 210. Kita punya instrument kebijakan....

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, saya minta masukan seharusnya kan gini, dari sampah kan bisa diolah menjadi energy listrik. Inikan kendalanya cuma satu, setelah menjadi energi listrik yang beli kan PLN, Pemerintah. Tapi kalau harganya sangat murah sekali sedangkan investasi untuk ini sangat mahal kenapa sih tidak diberikan harga khusus untuk listrik yang dari energi sampah. Inikan tinggal mau tidaknya Pemerintah, mau tidaknya PLN, kalau perlu nanti kita rapat gabungan dengan ESDM, dengan perindustrian juga, tadi berkenaan dengan pabrik air mineral wajib mempunyai bank sampah yang minimal 70 atau 80% dari hasil produksinya. Karena penyebab utamanya adalah pabrik-pabrik

produden minuman tadi, kenapa tidak bicara sama perindustrian, kita bicara perdagangan, komitmennya apa? Ya harus membeli minimal 70% dari produksi botol atau gelas plastic yang dikeluarkan. Itukan tidak sampai ke Undang-Undang cukup saya rasa cuman keputusan menteri saja.

Lanjutkan Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Terima kasih Ketua.

Tepat sekali, memang beberapa kali dilakukan rapat terbatas kabinet ternyata memang kuncinya di harga listriknya. Interaksi saya dengan Menteri ESDM itu mengatakan bahwa rata-rata mintanya mahal, tapi Bapak Presiden bilang jangan lihat listriknya, lihatnya itu bahwa sampahnya harus dirapikan, harus dibereskan. Itu kelihatannya yang belum ketemu Ketua, oleh karena itu saya kira usul rapat gabungan sangat kami dukung. Memang kayaknya yang mikiran sampahnya itu kita saja, yang lain mikirnya harganya dan lain sebagainya.

Sebetulnya dari sisi kita sudah ada upaya untuk memberikan subsidi untuk tipping fee,-nya collect-collect itu dan tadi seperti yang terhormat Bapak Ketua sampaikan kita resistensi dari industry juga cukup tinggi, karena kemasan-kemasan yang kecil-kecil itu yang kayak yang kecil-kecil dan lebih kecil lagi yang shampoo, yang sachet kecil-kecil itu juga resistensinya tinggi, karena kita tidak minta itu semakin dikurangi sampai habis tapi resistensinya juga cukup lumayan. Mungkin nanti perlu dibicarakan lagi secara konseptual dan khususnya Ketua.

Terima kasih banyak.

Kemudian terkait dengan konflik satwa liar, di dalam dokumen pada halaman 213 dan seterusnya. Saya mohon ijin melaporkan di halaman 216 bahwa di Jambi juga terjadi konflik Gajah. Kemudian di Kalimantan Tengah dengan Orang Utan. Kemudian Buaya di Sumsel, Sulteng, Sultra, NTT, Kaltim dan juga beberapa diantaranya. Yang Harimau di halaman 217 di Sumut, Riau, Sumsel, kemudian Lampung saya kira sudah berkali-kali juga yang terhormat Ketua menyampaikan beberapa kasus yang top waktu itu masalah seperti Bonita dan sebagainya. Kemudian ada juga Hiu Paus di Jawa Timur yang masuk ke instalasinya PLN.

Kemudian kita lihat yang terakhir di halaman 220, yaitu Harimau Enim di Sumatera Selatan di 2020 bulan Januari dan pada sebelumnya Januari 2019, yaitu Orang Utan Aceh. Yang Gajah di Sumatera pada halaman 224 itu sangat tinggi di 2017 dan terus frekuensinya cukup lumayan. Pemerintah berupaya untuk terus melakukan hal ini, upaya mencegahnya di Direktorat Jenderal Konservasi terutama di halaman 218 di 219 dan beberapa contoh penangana konflik di halaman 228, seperti Gajah di Tanggamus, di Aceh, di Riau, di Tembo

Jambi, kemudian Harimau di Sumut, Muara Enim dan seterusnya juga Buaya, Hiu Paus dan Orang Utan.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Selanjutnya tentang Omnibus Law saya kira karena kita akan FGD, maka kita nanti akan bicarakan. Dan berkenaan dengan BKPM, yang dimaksud di dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 sebetulnya adalah untuk mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan. Jadi yang diserahkan kepada BPKM itu adalah administrasinya. Maksudnya adalah untuk mengintegrasikan.

Jadi selama 5 tahun kemarin langkah-langkah di dalam peningkatan investasi itu mengalami hambatan. Jadi tercatat ada lebih kurang 780 triliun investasi yang mandek dan dengan bulan Desember kemarin dilakukan koordinasi yang intensif oleh BKPM itu bisa diselesaikan kira-kira Rp170 triliun. Jadi lebih keadministratif sebetulnya, supaya informasinya itu terkumpul. Sedangkan analisis teknis, penataan teknis itu tetap di kementerian. Kenapa? Karena seperti ijin pinjam pakai misalnya itu analisis trennya, analisis lapangannya harus kuat. Dan instrument analisisnya tidak mungkin ada di BKPM adanya tetap ada di planologi. Oleh karena itu, pengertian di delegasikan itu hanya administrative. Jadi menteri mem-*approve* dulu baru untuk kordinasinya maka penandatanganan ijinnya oleh BKPM. Jadi seperti itu posisinya Bapak Ketua, jadi tidak benar ada seluruh kewenangan dan mandate menurut Undang-Undang yang diserahkan hanya dengan SK Menteri. Jadi hanya penerbitan perijinannya saja, itu di Impresnya bunyinya seperti itu. Dan pelaksanaannya juga sebetulnya sudah berlangsung dan tidak ada masalah karena SNPK-nya dari kita, kita yang control juga.

Kemudian soal WWF, mohon ijin kami melaporkan bahwa KLHK telah melakukan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan WWF sejak Desember 2018. Ada persoalan yaitu berkaitan dengan perjanjian kerja sama antara WWF dengan Dirjen Konservasi, saya kira yang terhormat Bapak Darori memahami itu dengan baik, yang isisnya sebetulnya untuk Pemerintah dan untuk Negara Republik Indonesia itu jadi seperti lemah, kenapa? Karena di dalam perjanjian kerja sama pada tahun 1998 bunyinya bahwa Pemerintah hanya menyiapkan semacam *counterpart*, administrasi, ijin-ijin, dan dukungan fasilitasi.

Di dalam pelaksanaannya kita punya banyak ukuran juga. Nanti secara khusus kami bisa melaporkan termasuk *record* kita terhadap pekerjaan WWF di setiap UPT yang mereka bekerja itu *over claime*-nya juga terjadi cukup dasyat. Jadi misalnya, ternyata asetnya kalau dihitung sampai sekarang hanya Rp300 juta, misalnya di satu UPT, padahal kerjanya sudah berapa puluh tahun kan ngakunya sudah 52 dekad, 3 dekade dan sebagainya. Jadi terdapat beberapa kelemahan, sehingga memang harus dilakukan evaluasi dan melihat meninjau kembali perjanjian kerja sama yang tahun 1998. Jadi itu yang terjadi Bapak Ketua, sehingga kita sudah meminta kepada WWF saya menjelaskan beberapa hal yang terjadi itu. Dan kita sebetulnya meminta bagaimana melihat perubahan dari perjanjian kerja sama ini tapi input-nya tidak pernah masuk. Di luar selalu dikatakan bahwa Menteri LHK-nya tidak komunikatif, sebetulnya sih kita lakukan juga.

Jadi sebetulnya ada hal-hal seperti itu yang menurut peraturan perundang-undangan di negeri ini di kita memang harusnya diterapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi WWF juga bekerja, di dalam perjanjian kerja samanya itu hanya bicara tentang konservasi dan keanekaragaman hayati. Tetapi di dalam pelaksanaannya bekerjanya di landscape, di perubahan iklim, di ekowisata. Bahkan WWF sendiri punya konsesi di Jambi yang juga konsesinya kebakar juga. Dan yang paling parah mobilisasi untuk implikasi mendeskreditkan Pemerintah dan kalau saya menangkapnya itu bisa menghasut juga kepada rakyat untuk tidak percaya kepada Pemerintah, padahal faktanya tidak seperti itu. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah harus perjanjian kerja sama 1998-nya dirubah sehingga kita hentikan. Jadi pengertiannya seperti itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Menteri atas keterangannya.

Saya coba berpikir sudah lama, saya disini mungkin 10 tahun lebih. Kenapa sih di KLHK ini tidak merubah, tidak ada lagi istilah pinjam pakai tapi sewa pakai. Kalau memang di Undang-Undangnya pinjam pakai kenapa di omnibus law cipta kerja ini kita rubah sekian, karena pinjam pakai pengusahanya enak sementara apa yang kita dapatkan PNBPN kita untuk Pemerintah, untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Coba itu Bapak Sekjen saya minta tolong juga kalau pinjam pakai itu ada di Undang-Undang ya sekalian kita revisi Undang-Undangnya. Jadi tidak ada lagi istilah pinjam pakai seperti kita lihat kerusakan ini ada data tadi saya kerusakan tambang yang pinjam pakai, segala macam. Inikan sudah sangat keterlaluan sekali, cuman pinjam pakai mereka dapat duit, mereka dapat mengeksport segala macam sementara kerusakannya gimana. Coba kalau minimal sewa pakai, dari hasil PNBPN itu bisa untuk nutupin yang tadi ini, kalau mereka ingkar janji atau apa.

Yang terakhir Bapak Roy, saya minta tolong waktu itu ditindaklanjuti di Mandailing Natal yang pertambangan emas liar itu. Itu sangat meresahkan sekali sampai bayi cacatnya kita lihatnya sendiri tidak tegas, karena tadi peti itu menggunakan merkuri yang diluar nalar, diluar takarannya dan mereka tidak berpikir bahwa ini sangat bahaya sekali. Bukan hanya untuk yang bekerja termasuk istrinya dan anak yang dikandung oleh seorang Ibu. Banyak sekali kasus itu, minta tolong segera ditindaklanjuti.

Termasuk juga Dirjen KSDAE masalah yang kemarin itu dibantu Pak, kalau KSDAE tidak ada biar saya yang bantu nanti. Masalah yang membantu mengusir Gajah tetapi malah menjadi korban patah pinggangnya Pak. Biar nanti saya suruh Ketua DPRD saya disana untuk menindaklanjuti di Tanggamus Pak.

Jadi silakan dilanjutkan dengan Kepala Badan Restorasi Gambut. Saya ijin tidak memimpin rapat, biar Bapak Budi karena ada urusan dipanggil ke DPP karena Bapak Mindo sudah jalan.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Ijin Ibu Menteri.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swasti,
Namo budaya,
Salam kebajikan.

Pertama-tama saya ingin katakan tentu atas bimbingan Ibu Menteri, dukungan rekan-rekan dari beberapa Dirjen teknis, seperti Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan, Perubahan Iklim, juga dukungan dari Sekjen dan Irjen untuk memperkuat mekanisme kerja kami. Betul bahwa Bapak Presiden memerintahkan BGR untuk melanjutkan kerja hingga 5 tahun kedepan. Kita tentu akan mengevaluasi dan melihat apa yang bisa diperbaiki. Tentu ini tidak terlepas dari dukungan dari juga Ketua, Pimpinan Komisi dan Anggota. Saya ingat Rapat Dengar Pendapat bulan Januari di pimpinan oleh Bapak Sudin dan Bapak Budi juga yang memberikan rekomendasi untuk perpanjangan Badan Restorasi Gambut.

Terima kasih atas dukungan semua pihak.

Saya mulai dari menggambarkan bahwa Badan Restorasi Gambut diberi tugas untuk melakukan fasilitasi dan kordinasi kegiatan restorasi gambut dengan berbagai fungsi, menjalankan fungsi seperti perencanaan, pemetaan, penataan tata kelola dan seterusnya. Perpres dikeluarkan di awal di tahun 2016, 6 Januari 2016 tepatnya dan berakhir di 31 Desember yang tadi saya katakan bahwa Presiden telah memerintahkan untuk dilanjutkan dan penulisan Perpres sedang dalam proses.

Wilayah kerja BRG di 7 provinsi, jadi tidak seluruh Indonesia. 7 Provinsi yang memang memiliki kawasan ekosistem gambut yang cukup luas, yakni di Riau, di Jambi, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan di Provinsi Papua. Target yang diberikan oleh Bapak Presiden itu seluas 2 juta hektar. Di dalam kajian kami untuk memilih mana areal yang bekas terbakar 2015, mana kubah-kubah gambut penting yang rusak dan perlu diperbaiki agar tidak mudah terbakar lagi. Itu bahkan mendapatkan angka sampai 2,7 juta hektar jadi 600 lebih dari perminatan Bapak Presiden.

Pada kesempatan ini, ijin Bapak Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat, kami akan memberikan laporan. Cara kerja kami melalui 3 pendekatan, yaitu pembasahan kita sebut R1 rewriting, yang kedua penanaman atau revegetasi, yang ketiga peningkatan kesejahteraan masyarakat atau R3 revitalisasi life hood. Untuk 2019 realisasinya yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Slide selanjutnya tolong, dari pagu anggaran Rp310 miliar, realisasinya Rp269 miliar memang 86% itu terbagi 2 skema sebetulnya, skema pertama pagu anggaran untuk BRG di Jakarta sebesar Rp150 miliar yang terserap 92,84%. Karena BRG ialah lembaga Pemerintah non struktural kita tidak memiliki Satker di 7 Provinsi sehingga di dalam pekerjaan 7 provinsi itu banyak kami menitipkan kepada Pemerintah Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memang masih kita butuh perbaikan terus dan penguatan serapan dari dinas-dinas yang di provinsi yang melakukan tugas perbantuan ini, itu bervariasi dari 74% yang terendah di Kalimantan Selatan. Dan yang terbaik memang di Papua 99,94%. Tentu menjadi catatan kami untuk terus meningkatkan kinerja rekan-rekan yang berada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan Provinsi Riau agar tahun 2000 ini realisasinya bisa di atas 90%.

Penting menurut kami tugas perbantuan diberikan kepada Pemerintah Provinsi karena memang Pemprov atau Kabupaten Kota itu harus memiliki program restorasi gambut, *science of belonging*-nya harus ada di mereka dan juga dilengkapi dengan nanti kemampuan SDM, kemampuan managerial administrasi, dan seterusnya. Kita akan terus perbaiki agar serapan di tahun berikutnya akan bisa lebih baik terutama rekan-rekan dari Pemprov.

Selanjutnya di tahun 2019 ini BRG di dalam program R1 itu pembasahan kita perkirakan ada 105.565 hektar yang terdampak upaya pembasahan dari target 2 juta yang Bapak Presiden berikan. Dan yang 105.665 hektar ini semuanya dikawasan yang non kokesi seperti arahan Ibu, BRG berkonsentrasi di areal yang belum ada konsesi. Dan juga ada beberapa kegiatan di kawasan konservasi tentunya ini dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal KSDAE melalui balai-balai konservasi sumber daya di provinsi maupun balai taman nasional. Ada beberapa provinsi yang memang kawasan konservasi yang juga jadi target restorasi gambut.

Selanjutnya, dari rencana ideal restorasi gambut yang dibuat tahun 2018 itu kita idealnya ingin melakukan restorasi gambut dengan 8000 unit infrastruktur pembasahan. Ini rencana dibuat di tahun 2018, tapi ketika anggaran turun dan melihat keadaan yang ada memang targetnya harus juga diturunkan karena anggarannya tidak mencapai seperti kalau kita ingin membangun 8000 unit infrastruktur pembasahan. Di samping itu juga ada kendala ketidaksiapan tadi beberapa rekan-rekan di provinsi sehingga serapan tidak bisa 95% keatas. Dan juga ada lokasi yang mestinya dilakukan pembasahan itu ternyata sudah masuk jadi kawasan perusahaan, jadi data ijin kami belum up to date sehingga tentu upaya pembangunan sumur bor tidak bisa dilakukan dengan APBN karena itu memang menjadi kewajiban perusahaan.

Nah, di samping tugas R1 di kawasan yang non konsesi, mengacu kepada PP dan Peraturan Menteri kita memberikan akses teknis atau bimbingan teknis kepada pengusaha di dalam membangun infrastruktur pembasahan. Jadi sudah ada Permen, sudah ada panduan teknis dari Ditjen

tetapi harus diakui rekan-rekan perusahaan terutama perusahaan sawit itu masih butuh bimbingan teknis dan konsultasi. Jadi kita membuat program itu melibatkan para pakar hidrology, pakar gambut dari universitas-universitas yang ada di 7 provinsi. Jadi misalnya kalau kita turun memberikan bimbingan teknis kepada perusahaan sawit di Sumatera Selatan tentu pakar gambut dan pakar hidrology dari Universitas Sriwijaya ataupun pakar-pakar lainnya kita libatkan dan dibentuk tim bimbingan teknis dan tim aksistensi. Total di tahun 2019 ada 29 perusahaan perkebunan yang mendapatkan bimtek ini. Ada yang hanya sekedar Bimtek 2-3 hari di kelas, ada juga yang sampai kelapangan melihat contoh pembangunan infrastruktur pembasahan setiap kanal.

Luas area 29 perusahaan yang di kawasan gambut ada sekitar 237.207 hektar. Di samping itu dukungan-dukungan ini dari anggaran bantuan dana hibah Pemerintah Inggris yang kemudian dijalankan oleh Bappenas juga terbangun 262 unit infrastruktur pembasahan dengan perkiraan dampak luas yang terbasahi 4.120 hektar. Jadi total 105.565 hektar itu yang diluar konsesi plus 237.000 yang di dalam konsesi berupa bimbingan teknis dan juga ada 262 unit tadi dilakukan oleh rekan kami di Bappenas dengan total 4.120 hektar.

Slide selanjutnya yang saya hormati Bapak dan Ibu. DR2 kegiatan revegetasi kita membuat demplot untuk penanaman kembali area-area gambut yang rusak itu ada 400 hektar terealisasi semuanya. Ada penanaman tanaman keras ada juga dicampur dengan tanaman semusim berupa agro forestry. Terbagi di 7 provinsi atau tempat kami bekerja.

Selanjutnya, kita juga memberikan bantuan paket revitalisasi ekonomi ini kepada Pokmas-Pokmas tentu ini bekerja banyak dengan Pemprov, dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan ataupun UKM di Provinsi. 22 paket ini diberikan kepada 122 Pokmas berbagai kegiatan tentu dengan tujuan masyarakat tidak lagi membuka lahan gambut dengan cara membakar tapi bisa tadi Ibu melaporkan dengan pola PLTB (Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar) atau juga mengalihkan kegiatannya ke peternakan dan perikanan ataupun upaya UKM lainnya. Program ini banyak kita sebut di dalam program Desa Peduli Gambut, ada 140 desa yang telah kita masuki di tahun 2019.

Selanjutnya bagian 3 ini untuk tahun 2020 dan ini mohon bimbingan dan saran dari teman-teman Anggota Dewan, karena pekerjaan ini di 7 provinsi banyak saya kira meningkatkan juga keekonomian masyarakat di Dapil-Dapil Anggota Dewan yang terhormat.

Seperti tahun sebelumnya anggaran BRG dibagi 2 Rp162 miliar hampir Rp163 miliar itu di BRG di Kantor Pusat Jakarta untuk kegiatan pemetaan, kegiatan inventaris, kegiatan kajian, sosialisasi, edukasi, dan juga pembasahan gambut di kawasan konservasi. Tadi kalau yang dikawasan on konservasi kita berikan tugas perbantuan. Nah, yang tugas perbantuan tahun ini kita anggarkan Rp150 miliar dibagikan 7 Provinsi dengan nilai yang tertinggi itu di Kalimantan Tengah sebesar Rp53.500.000.000,00 kemudian yang kedua di Sumatera Selatan Rp31 miliar. Di Riau Rp23.700.000.000,00 di Jambi Rp6,5 miliar dan di Papua Rp9,53 miliar tahun ini Papua naik banyak dari tahun lalu karena memang serapannya bagus dan perhatian Pemerintah Daerah yang

sangat kita apresiasi. Di Kalimantan Selatan Rp4,5 miliar. Ini semua anggaran untuk Pemerintah Provinsi berupa tugas perbantuan atau skema TP.

Selanjutnya, ini jumlah ekosistem gambut atau kesatuan hidrogis gambut dimana kita bekerja, ada 5 KHG di Riau, 3 di Jambi, di Sumatera Selatan ada 10 cukup banyak memang, di Kalimantan Barat ada 8, Kalimantan Selatan ada 2 KHG, Kalimantan Tengah 9 KHG, dan di Papua ada 3 KHG ini umumnya terpusat di bagian selatan di Merauke dan Mafi.

Selanjutnya ini ada program BRG berbasis masyarakat dikawasan konservasi. Kawasan konservasi ini kita kerjakan bersama Dirjen KSDAE dengan year to date di provinsi itu dengan nilai Rp37 miliar, ini anggaran yang dikelola langsung oleh BRG Pusat. Kegiatannya berupa pemulihan ekosistem gambut berupa operasi pembasahan terutama kalau sudah kemarau dan terancam kritis kering kita basahi sebelum kemarau puncak. Kemudian ada pemeliharaan sekat kanal ataupun infrastruktur pembasahan yang telah dibangun tahun-tahun sebelumnya.

Mohon catatan Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, di dalam membangun infrastruktur kita mengupayakan memprioritaskan yang membangun adalah masyarakat, sehingga banyak infrastruktur yang dibangun dengan teknologi sederhana, ini Wamen yang menjadi perancang struktur bangunannya tahun lalu. Menggunakan struktur sederhana dan dari kayu, dan karena dari kayu harus kita pelihara setiap tahun karena kayu ada lapuk, ada yang rusak dan seterusnya. Kalau dengan beton memang lebih kuat tetapi kalau dengan beton harganya juga jauh lebih mahal bisa sampai 8 kali lipat. Dan upaya dibangun oleh masyarakat mungkin juga lebih terbatas. Masyarakat lebih terbiasa kalau pembangunan infrastruktur sederhana dan dari kayu. Jadi kita anggarkan juga biaya pemeliharaan dan juga biaya R2 revegetasi. Dan juga ada bantuan untuk sekolah lapang petani, ini tentu ini mengarah ke metode PLTB (Pengelola Lahan Tanpa Bakar).

Selanjutnya, ini kalau ingin melihat lebih dengan lebih detail Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dari Provinsi yang bersangkutan. Di Riau kanal ada sekian paket, nilai berapa itu Kabupaten Siak dan Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Pulauawan misalnya. Ada revitalisasi ekonomi itu bagian yang di bawah berupa paket bantuan ekonomi pada masyarakat sekitar kawasan TWA Sungai Dumai di Siak dan Dumai. Revitalisasi kawasan konservasi sekitar Suaka Marga Satwa....

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ijin Pimpinan, Pimpinan ijin.

Saya kira pemaparan Bapak Gambut ini sudah jelas Pak, tulisannya cantik, jenis-jenisnya asal jangan tulis jenis kelamin saja Pak. Saya kira ini kita skors saja dulu Bapak Pimpinan, karena sudah siang, Ibu Menteri pun sudah lapar, sama-sama lapar. Dan saran kepada Pimpinan, supaya rapat ini jangan bertele-tele, karena Ibu Menteri tadi kita apresiasi ini minta bantuan sama kita masalah anggaran yang lain-lain. Mohon kepada kedua Pimpinan juga

berkoordinasi dengan Dirjen-dirjen ini apakah aspirasi kita sudah terserap, bagaimana, supaya ini *clear* habis makan siang tidak usah lama-lama lagi ibu Menteri, jam 15.00 WIB selesai itu saja, skors saja.

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik, terima kasih Bapak Salim.

Pak Kepala BRG dan Ibu Menteri mohon maaf, memang tadi sebenarnya saya juga rencananya begitu Bapak Salim, tapi kayaknya Bapak Salim ini sudah sangat lapar Pak. Jadi saya tawarkan kepada Anggota kalau disetujui kita akan skors untuk Ishoma, dan pada saat yang sama kita ingin mengundang para Eselon I untuk berdiskusi ngobrol-ngobrol santai mungkin di Setkom. Jadi saya minta persetujuannya kita skors 1 jam.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Pak Ketua, saya kira biar singkat yang diundang tidak semuanya, di bawah koordinasi Bapak Sekjen mungkin sampah, BPDASHL, terus perhutanan sosial, ini 5 atau 4 Dirjen saja.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau demikian sesuai dengan persetujuan rapat kita skors sampai 13.30 WIB.

(RAPAT DISKORS)

Belum kenyang Bang Salim.

Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Teman-teman Anggota yang kami hormati,
Pimpinan, Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri dan seluruh peserta rapat yang kami hormati.

Sebagai informasi sesuai Rapat Pimpinan dan Kapoksi kita telah sepakat mengenai hal-hal yang menyangkut aspirasi Anggota dan kita ingin mengefisiensikan waktu rapat ini sebaik-baiknya. Untuk itu, kami ingin menginformasikan kepada Anggota juga bila ada hal-hal yang masih ingin disampaikan diluar pembahasan anggaran atau aspirasi tadi Pimpinan dan Kapoksi sepakat setiap fraksi akan diwakilkan oleh satu juru bicara. Jadi kalau nanti dari Fraksi ada silakan dirembukan siapa dari setiap fraksi yang akan menjadi juru bicaranya.

Saya rasa bisa disetujui ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kalau gitu kita mulai dari Partai Golongan Karya, diwakilkan oleh Bapak Kapoksi Bapak Salim Fakhry.

Waktu dan tempat kami persilakan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,
Ibu Menteri, Bapak Wamen, para Eselon I yang kami hormati.

Saya langsung saja Bapak Pimpinan, hari ini luar biasa bahagiannya Bapak Pimpinan. Tiga kementerian tidak pernah semulus dengan para Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup. mungkin doa apa yang dibuat oleh Ibu Menteri. Tadi Pimpinan menyatakan dan paparan Ibu Menteri menyatakan perlunya penambahan Pak Ketua, penambahan anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah dipaparkan oleh Ibu Menteri, saya kira wajar-wajar Pak Ketua, cuma ada saran dan masukan Pimpinan, Ibu Menteri tolong dipersiapkan detail anggaran yang untuk ditambah dan atas seijin Pimpinan, kami yang di Banggar Komisi IV DPR RI tolong nanti Bapak Pimpinan, mungkin dengan Bapak Sekjen mewakili Ibu Menteri kita duduk, Banggar, Komisi IV DPR RI yang ada di Banggar untuk memperjuangkan hal-hal yang sudah kita sepakati Pak Ketua. Ini sangat kami respon Ibu Menteri, karena keberhasilan Ibu adalah keberhasilan kami juga.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak Salim, tadi pagi habis sarapan apa?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya senyum-senyum nengok Ibu Menteri itu.

Hanya ada masukan lagi Bapak Ketua, saran-saran dari Anggota Ibu Menteri hendaknya kalau ada kunjungan Ibu ke daerah Provinsi jangan dibedakan dengan Kementerian lain. Katakan Kementerian Pertanian dan Perikanan selalu melibatkan Anggota DPR RI dari Dapil yang bersangkutan yang dikunjungi oleh Menteri KLH. Ini masukan.

Selanjutnya Ibu Menteri, khusus kepada Bapak Wiratno melalui Ibu Menteri. Ibu Taman Nasional Gunung Leuser Ibu hafal betul Ibu, saya kira pembangunan untuk Taman Nasional Gunung Leuser bukan saya mengatakan Sumatera Utara, sudah cukuplah untuk Sumatera Utara Ibu. Kedepannya tolong diprioritaskan Bapak Wiratno ke Aceh Ibu, sebab 10 Pak Ketua, 10 kabupaten yang beririsan di Taman Nasional Gunung Leuser intinya ada di Provinsi Aceh. Kantor saja sekarang berapa kali sudah kita usulkan balainya ada di Sumatera Utara sementara Aceh yang terbesar Taman Nasional Gunung Leusernya. Cuma itu kebijakan Ibu Menteri, hampir selalu setiap rapat Pak Dedi kami mengusulkan ini. Bukan karena kami putera Aceh

memang asal kantornya dulu di Aceh, setelah ada GAM konflik dulu dipindahkan ke Sumatera Utara. Kabupaten Langkat saya kira hanya sedikit Ibu.

Selanjutnya Ibu, baru-baru ini ada kebakaran di Kabupaten Aceh Tenggara, kebakaran hutan Ibu. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di Kecamatan Leuser, ada yang terbakar *Insyah Allah* sudah mampu. Ada permohonan dari Dapil Ibu, untuk pengadaan mobil slip on, karena disana rentan kebakaran, rentan longsor, andaikan ada memang program itu apa salahnya.

Selanjutnya untuk daerah kami daerah rawan longsor hampir setiap bulan Ibu di Aceh Tenggara, Ibu tahu. Longsor apa salahnya Ibu bantuan vetifer untuk daerah rawan longsor mungkin Bapak Wiratno ada 1000 bibit entah apa namanya. Sudah itu Ibu, ada kebun bibit desa Ibu, kami mohon minimal 10 unit untuk dukung kemitraan konservasi di kabupaten Aceh Tenggara. Karena di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut mempunyai ada 18.000 hektar Pak Wiratno potensi untuk konservasi Ibu. Sekarang pun sudah ada dilakukan mungkin hanya 1000 hektar Pak. Masalah perhatian pembangunan tadi sudah jelas Ibu, kedepannya kalau ada pembangunan-pembangunan saya bukan melarang Sumatera Utara Ibu, Sumatera Utara pun Indonesia, Cuma sudah cukuplah Ibu.

Hari itu ada janji Ibu dulu ada pembangunan entah tahun ini masuk atau tidak, tidak tahulah saya Ketua. Intinya kesimpulan dipersingkat saja Pimpinan, kita dari Komisi IV DPR RI harus komitmen apa yang dikeluhkan oleh Ibu Menteri tadi untuk membantu kementerian ini cuman kami bantu disini Ibu, Ibu yang mengusulkan, Ibu bicarakan dengan Bapak Presiden di Banggar itu urusan Banggar Komisi IV DPR RI Pak Darori. Sebab Ibu, begini-begini saya Anggota Banggar Ibu. Sebab senyum Bapak Wamen ini hampir sama dengan senyum Pak Dedi saya tengok. Inilah kalau rapat sudah enak Pak Ketua, tidak macam Menteri yang terdahulu. Saya kira sudah banyak-banyak Ibu, ini saja Ibu, cuman perhatian tadi di Taman Nasional Gunung Leuser Bu, perlu rehabilitasi Ibu. Banyaknya perambahan yang dulu Pak Ketua, perlu kita reboisasi karena di sana khususnya di Kabupaten kita di Kabupaten Aceh Tenggara dari 440 ribu meter bujur sangkar 84% Taman Nasional Gunung Leuser.

Kalau diambil hasil hutannya ada Keppres 33, dunia marah katakan itu adalah oksigen cuman oksigen orang mati di sana Amerika yang senang, kan tidak salah kalau ini khusus mendapatkan perhatian.

Terima kasih Bapak Pimpinan.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Salim.

Kita sambut baik tadi permintaan Ibu Menteri dan saya rasa Komisi IV DPR RI mendukung penuh adanya keperluan peningkatan anggaran apalagi kalau nanti itu tujuannya untuk rehabilitasi, konservasi saya rasa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai mitra kerja Komisi IV DPR RI akan mendapatkan dukungan penuh.

Terima kasih Bapak Salim Fakhry.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit lagi Bapak Ketua, tolog dimasukkan ke kesimpulan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, tolong dicatat nanti ya kita masukkan dalam kesimpulan.

Terima kasih juru bicara Fraksi Partai Golkar tadi kelewatan sebelum Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan kita persilakan juru bicaranya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Mbak Kiki selaku juru bicara PDI Perjuangan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Mohon ijin, senior-senior Pak Kapoksi.

Pada dasarnya Fraksi PDI Perjuangan juga disini sudah mendengar dan mencermati apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri beserta jajaran. Yang pasti selama itu untuk kebaikan masyarakat dan kemajuan Indonesia kedepan kami bersepakat mendukungf apapun program itu selama itu realistis dan base on data yang pasti. Dan kami juga akan mendorong tadi ada yang Ibu garis bawah bahwa kerja hari ini tidak akan selesai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri. Oleh karena itu, saya harap rekan-rekan yang lain juga mendorong agenda yang sama untuk menggarisbawahi di mitra kerja Komisi IV DPR RI yang lainnya bahwa ada sesuatu hal yang memang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian itu sendiri, supaya kita bersepakat ini agar kedepannya. Yang tadi Bang Salim sudah sampaikan bahwa kita mendukung penuh ya mudah-mudahan bukan hanya Komisi IV DPR RI tapi mitra-mitra terkait juga mampu kita dorong untuk melakukan hal yang sama.

Kemudian program-program yang tadi disampaikan terkait konservasi dan beberapa hal tadi juga disampaikan juga terkait baik juga dari Badan Restorasi Gambut dan beberapa program lain dari Dirjen-dirjen terkait saya harap juga bisa disinergikan dengan Komisi IV DPR RI kedepannya. Dan yang harus digarisbawahi adalah terkait Omnibus Law yang tadi Ibu sampaikan.

Ombibus Law ini saya tadi sudah diskusi kecil saya harap kedepannya apalagi memang mau ada FDG kita harus memastikan bahwa Omnibus Law memang bisa diaplikasikan dan bisa dijalankan kedepannya bukan hanya sekedar membuat sebuah peristilah baru dalam perundang-undangan dan peraturan.

Itu saja dari kami, mungkin ada tambahan silakan Bapak Kapoksi.

Terima kasih.

F-PDIP (H. YADI SRIMULYADI):

Pimpinan, tambahan sedikit dari Fraksi PDIP.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Yadi.

F-PDIP (H. YADI SRIMULYADI):

Ibu Menteri, ini sekedar informasi saja di Dapil saya di Kabupaten Bandung Barat terutama di hutan cagar Alam Kamojang kondisinya sekarang rusak parah Ibu. Itu terutama karena adanya pengeboran gas alam Kamojang yang secara teknis katanya tidak memakai air permukaan tapi kenyataannya air permukaan disana habis kering yang dulu ada danau sekarang sudah tidak ada. Dan juga daerah-daerah sekitarnya sudah gundul dipakai perkebunan oleh masyarakat bahkan dipakai off road oleh anak-anak muda, padahal itu Gunung Rakutak sebelahnya itu adalah dulu itu basisnya DI Kartosuwiryo. Pengertiannya dulu itu sangat lebat sekali, jangankan bisa jalan kesana susah sekali, sekarang sudah rusak dan mohon ini diperhatikan, karena selama ini saya tidak melihat ada reboisasi atau perbaikan dari Menteri Kehutanan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih teman-teman dari PDI Perjuangan.

Berikutnya kami persilakan dari Partai Gerindra untuk juru bicaranya silakan bicara Ibu Endang atau Bapak Darori.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih.

Mewakili teman-teman.

Pak Ketua, pertama Pimpinan Presiden 5 tahun pertama sudah berjalan dengan baik, tapi ada satu catatan bahwa kondisi kita selama 5 tahun ini terjadinya bencana alam, banjir, longsor dan seterusnya sebagai bukti ternyata Jakarta itu hulu sungainya itu hanya 4% penutupan lahannya. Jadi ada

penurunan yang luar biasa, sehingga Jakarta banjir itu wajar. Hitung-hitungan saya kalau 10 tahun ini kita serius kawasan daerah hulu sungainya kita hijaukan yang tadi disampaikan teman-teman minimal untuk kehutanan itu harus ditambah minimal dana Rp15 triliun Bapak Ketua. Dan ini mohon Bapak Ketua dan teman-teman nanti rinciannya untuk konservasi dan revitalisasi bisa kita bicarakan bersama dengan Dirjen yang terkait. Itu yang pertama.

Yang kedua Ibu Menteri, soal kebakaran ini ada beberapa Bupati menanyakan kepada saya karena kewenangan di kehutanan di tarik ke provinsi seolah-olah Bupati itu tidak bertanggungjawab, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi saran saya untuk hal-hal pengamanan hutan mungkin di Peraturan Pemerintah-nya ada perubahan diberikan kewenangan kepada Bupati Ibu. Karena ini Bupati merasa saya kan tidak bertanggungjawab dan Bupati tidak bisa menganggarkan ke APBD-nya karena tidak ada penugasan termasuk dana bagi hasil dari dana reboisasi kalau itu mungkin ada penugasan bisa digunakan untuk kegiatan seperti itu.

Yang kedua, kemarin kita Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian bahwa kebakaran hutan dan lahan itu hutan yang kebakaran 30%, yang banyak kan lahan tapi bebannya seolah-olah di Kementerian LHK. Kemarin saya sudah bicara dengan Menteri *alhamdulillah* yang dulunya menangani kebakaran Kepala Seksi sekarang sudah Eselon II dan anggarannya juga cukup besar yang dianggarkan untuk pengendalian kebakaran di luar kawasan. Dan harapan saya adanya koordinasi antara Kementerian Kehutanan Pertanian untuk menanggulangi data yang kita terima tahun ini mungkin kebakaran akan lebih besar. Jadi secara awal perlu kita tindaklanjuti.

Saya kira itu Ketua intinya.

Terima kasih.

Mungkin ada Ibu Endang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ibu Endang mungkin ada yang mau disampaikan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Saya hanya menggarisbawahi usulan dari Bapak Darori sebagai Ketua Kapoksi dan disini ada Ketua kita Bapak Budi tentang Badan Litbang Pertanian dan Badan Litbang Kehutanan dan Perikanan, karena dulu jadi satu sehingga saya pernah merintis untuk mengirimkan semua calon Doktor, tapi akhirnya para penelitinya tidak dipekerjakan dan diberi biaya yang mencukupi. Nah, ini PR kita bersama Ibu, karena tadi koordinasi antara Badan Litbang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan itu perlu didorong. Jadi mohon anggaran-anggarnya diperbesar. Kemudian di Bogor itu ada Balai Bio Gen yang cukup terkenal....

KETUA RAPAT:

Ibu Endang, maaf. Tadi sesuai dengan kesepakatan Kapoksi dan Pimpinan, satu juru bicara per Fraksi.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Saya menyerahkan ini saja Ibu, semua sudah saya tulis.

KETUA RAPAT:

Tolong dibantu mungkin Pak Dirjen atau Bapak siapa bisa mewakili untuk di-photo.

Terima kasih teman-teman dari Fraksi Gerindra.

Berikutnya kami persilakan dari Fraksi NasDem, siapa yang ingin mewakili ada Bapak Abdullah Tuastikal.

Silakan Pak.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASTIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Ibu Menteri, para Dirjen beserta para jajarannya, Teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Hari ini kebetulan Ketua dan Kapoksi tidak ada, kalau ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan untuk itu saya mewakili Fraksi Partai NasDem. Saya kira Rapat Dengar Pendapat dan lain-lain soal masukan-masukan terkait dengan reboisasi, terkait dengan kebakaran hutan, gambut dan lain-lain memang setiap wilayah pasti berbeda. Maluku berbeda, Kalimantan, Jawa berbeda. Pasti pendapat-pendapat juga berbeda.

Untuk itu, saya cuman mau mengusulkan saja kedepan anggaran Kementerian Kehutanan ini harus kita naikkan. Saya juga kebetulan di Banggar beserta teman-teman yang lain dan kalau kedepan saya kira perlu konsep awal perencanaan kita awal kalau bisa juga dari Komisi kita juga dilibatkan agar pada saat Rapat Kerja seperti ini, itu perencanaannya tepat anggarannya juga cukup, sehingga kedepan tidak lagi ada hal-hal yang memang ada kalanya ada perbedaan.

Saya kira perbedaan-perbedaan ini untuk kepentingan Dapil. Untuk itu, dari saya mewakili Fraksi Nasdem yang ada di Komisi IV DPR RI, prinsipnya saya

mendukung apa yang menjadi konsep dari Kementerian dan apa yang menjadi masukan yang telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Kerja hari ini.

Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Abdullah Tuastikal dari Fraksi Partai Nasdem.

Dan selanjutnya kami persilakan perwakilan dari Fraksi PKB.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih.

Nanti Pak Kapoksi tetapi hanya penegasan saja.

Pimpinan, segenap Anggota, Ibu Menteri dan seluruh jajaran.

Saya hanya melakukan penegasan, yang pertama bahwa bencana dimana-mana sehingga dorongan untuk penguatan program di bidang konservasi reboisasi dan rehabilitasi menjadi sangat penting. Kita minta juga nanti itu menjadi bagian dari kesimpulan kita ya, bahwa penguatan anggaran tetapi tadi Pak Sekjen sudah memperlihatkan sudah punya master plan. Saya rasa juga bisa ditambahkan kita butuh waktu khusus dalam bentuk FGD atau apa, sehingga kita semakin mematangkan perencanaan tersebut bersama Komisi IV DPR RI karena kita yakin semua Anggota pasti memahami akan membantu keberhasilan program ini karena kita lebih memahami di Dapil kita masing-masing. Mana hutan yang harus direhabilitasi, di konservasi, sehingga kegotong royongan, keterlibatan bersama. Mungkin dua hal itu bisa menjadi kesimpulan nanti yang penting di dalam Rapat Kerja ini.

Selanjutnya kami persilakan kepada Kapoksi PKB.

Terima kasih.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.):

Monggo Pak Kapoksi.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Saya persilakan saya nanti nyambung saja.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.):

Baik, Bapak Kapoksi.

Ibu Menteri dan para Dirjen saya hormati,
Pimpinan yang berbahagia.

Terima kasih Ibu.

Kak Ansy boleh ke depan sedikit, biar Ibu Menteri lihat saya.

Ibu Menteri terima kasih sudah hadir di Dapil saya, ini bukan colekan tapi kode keras. Terima kasih karena Waduk Wonogiri juga menjadi isu nasional karena sudah diangkat oleh Presiden beberapa kali kita juga sudah menyampaikan sebenarnya bukan hanya Waduk Gajah Mungkur akan tetapi juga ada Kedung Ombo yang kebetulan itu meliputi 4 kabupaten dan beririsan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur tapi termasuk juga ada di Sragen, dan ini juga mohon perhatiannya. Termasuk juga bendungan-bendungan kecil yang lain yang semuanya sedang dalam kondisi yang sangat kritis, jadi semuanya sudah menderita Ibu. Bahkan beberapa usulan dari Kepala Desa, semuanya minta pengerukan karena mereka tidak tahu teknologi apa lagi yang bisa digunakan untuk bisa menyelematkan itu karena ini juga menyangkut pertanian, lingkungan mereka dan seterusnya.

Nah, yang ingin saya soroti adalah tidak jemu-jemu kita ulang lagi terkait dengan limbah yang berbahaya dimana beberapa waktu yang lalu juga Komisi IV DPR RI itu pernah melakukan gerebek dan menemukan adanya begitu banyak container yang berbahaya yang berisi limbah B3. Dan kita ingin tanggapan dari Kementerian Ibu terkait dengan komitmen kita untuk bisa tidak menjadi negara tujuan pembangunan limbah yang sungguh memalukan ini karena dilihat dari situasinya memang Cina sudah melakukan stop, tapi ternyata begitu Cina punya komitmen itu kenapa kemudian larinya kepada kita dan seolah-olah kemudian tidak sama ini pendapatnya antara unsur di Pemerintah karena dianggap itu masih dibutuhkan di satu sisi dan kemudian juga ada regulasi dari Kementerian Perdagangan yang bicara lain. Di sisi lain kemudian juga Menteri Lingkungan Hidup juga punya posisi yang lain.

Nah, ini pertanyaan kita saya ke Ibu dan juga sekaligus *encourage* untuk Pimpinan, bahwa mungkin perlu memang rapat gabungan karena kebijakan ini tidak bisa diputuskan sendiri baik itu dari Menko Maritim, kemudian juga Perdagangan dan KLHK duduk bareng ini yang terkait dengan limbah berbahaya dan beracun itu.

Kemudian yang berikutnya Ibu, ini yang terkait juga dengan perijinan industry ekstratif yang memang juga sangat meningkatkan adanya potensi bahaya, meskipun kita bukan mitranya ESDM tapi lagi-lagi bahwa isu lingkungan hidup ini sudah menjadi kepentingan kita bersama. Jadi apa yang terjadi disini tidak mungkin juga dilewatkan dari mata dunia. Jadi apakah ini juga nanti dimungkinkan kita akan melakukan rapat gabungan juga dengan

Menteri ESDM karena ini terkait dengan Tupoksi kita Pimpinan. Dan kalau disetujui maka ini bisa menjadi kesimpulan rapat pada hari ini.

Yang berikutnya ini juga ada usulan aspirasi dari teman-teman LMDH di Jawa Timur khususnya yang ada Seladren Ibu Menteri. Jadi mereka ini sudah mengajukan semacam IPHPS atau ijin pemanfaatan hutan sosial ada 60 yang sudah diajukan tetapi sampai hari ini setelah sekian lama itu yang diverifikasi kok baru 13. Nah, kalau yang sudah direvisi ini pun yang 13 juga ternyata SK-nya juga tidak diturunkan jadi sisanya juga tidak jelas itu mau dikemanakan. Di sisi lain juga ada rumor, nah ini yang tidak enak ada rumor bahwa ada kelembagaan lain di luar LMDH yang ternyata kemudian mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan ijin pemanfaatan hutan sosial. Nah, ini mohon klarifikasinya apakah memang benar demikian ataukah itu hanya rumor semata, begitu ya Pak Kapoksi ya.

Saya kira itu Ibu yang terakhir sekali, bahwa penting untuk pelibatan masyarakat bahwa kampanye yang terkait dengan lingkungan ini tidak bisa pendekatannya sekedar *top down* tetapi juga harus dari *bottom up*. Sisi lain juga ada aspek cultural yang mau tidak mau itu harus kita adopsi yang itu kearifan lokal yang itu mesti harus kita integrasikan di dalam kebijakan ini pelibatan semua *stake holder*, baik itu dari kelompok agamawan, dari kelompok muda, kelompok perempuan dan seterusnya bagaimana ini bisa dirumuskan dan ada turunan programnya sehingga kita pun juga bisa kawal dan bisa memantau bareng-bareng dilapangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih teman-teman dari Fraksi PKB.

Ibu Menteri, mungkin ijin saya menambahkan menggarisbawahi sedikit saja permasalahan sampah ini untuk lingkungan kita. Terkait tadi Ibu Menteri sempat paparkan mengenai potensi wish to energy yang sebenarnya sudah banyak diminati oleh dunia usaha termasuk oleh calon-calon investor dari luar negeri yang saya sempat bertemu beberapa kali juga.

Nah, di minat ini kita ingin garisbawahi jangan sampai ini karena setahu saya mereka selalu menggarisbawahi ketersediaan bahan baku sampah untuk menjadi bahan wish to energy mereka itu. Tapi dengan banyaknya atau isu-isu mengenai susahnyanya mendapatkan bahan baku di dalam negeri ini kadang-kadang disalah gunakan, di salah artikan menjadi banyak sekali investor di bidang wish to energy ini malah mengimpor sampah dari luar negeri.

Nah, masalah salah satu isu pokok yang tadi juga di dalam paparan Ibu Menteri adalah tidak ada larangan mengenai impor sampah kertas ataupun sampak plastik. Saya memang bukan ahli dalam bidang ini tetapi menurut saya apakah di Indonesia itu kurang sampah kertas, apakah di Indonesia itu kurang sampah plastik. Apakah tidak sebaiknya benar-benar kita duduk bersama ya kita larang, kita revisi, jadi tidak ada lagi impor apakah itu sampah kertas, scrap

plastik apalagi. Kita affirmative action saja bahwa wish sampah itu sampah. Jangan kita mengotori lingkungan hidup kita sendiri dengan cara kita mendatangkan sampah dari luar negeri.

Sedikit itu dari saya, terima kasih teman-teman dari PKB.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Demokrat, Pak Kapoksi silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta Ibu Menteri dan seluruh jajaran Eselon I.

Kalau kita mendengar dulu yang namanya hutan rakyat itu ketakutan dengan hutan. Kenapa? karena pendekatannya adalah keamanan, ditangkap, diadili, kemudian dipenjara. Pada saat yang bersamaan tiba-tiba keluar HGU datang orang Jakarta babat habis, tanam sawit, orang yang ditangkap kemarin mungkin curi hanya 1, 2 pohon tapi masuk dalam penjara.

Saya kira pendekatan ini sudah berubah selama Ibu menjadi Menteri, tidak lagi semata pendekatan keamanan tapi lebih banyak pendekatan sosial. Dan saya kira ini adalah hal yang sangat baik karena akan muncul rasa memiliki sehingga dengan demikian menjaga bersama dan ada manfaat bagi masyarakat kecil untuk hutan kita. Dan saya juga melihat bahwa tata kelola keuangan 2019 cukup baik dengan capaian 96,59%. Dan saya yakin akan WTP lagi, saya kira hal yang perlu kita berikan apresiasi

Ada beberapa hal yang ingin kami tekankan dari Fraksi Partai Demokrat, yang pertama adalah impor sampah yang tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan juga. Saya kira ini menurunkan wibawa bangsa Ibu, masa kita mau impor sampah. Ini juga membunuh UMKM yang selama ini memungut, memilah kemudian harganya menjadi murah dan sekarang banyak sampah justru berserakan di mana-mana. Saya kira ini kalau bisa stop lah ini impor sampah apapun alasannya.

Yang ketiga, sertifikat. Ada sertifikat ini *chase* di daerah saya, ada sertifikatnya diruangan saya sementara TA saya ambil. Sertifikat dimiliki sejak tahun 2000 tiba-tiba dinyatakan sebagai kawasan hutan. Saya kira ini tidak baik, mungkin aparat kehutanan yang ada di daerah saya tidak memahami ini dan sesungguhnya bagaimana status sertifikat yang sudah lebih dulu keluar baru masuk pencaangan menjadi kawasan hutan.

Yang keempat adalah tentang kebakaran hutan. Saya kira kita melakukan Kunspek dan analisis bahwa kebakaran hutan itu sengaja dibakar oleh oknum tertentu. Kemudian pada saat yang bersamaan kita menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk memulihkan kembali saya kira ini juga menjadi maka berikut-berikutnya akan diapakan lagi, digelontorkan lagi anggaran. Okelah kalau memangnya yang ingin distabilkan adalah

kawasan-kawasan gambut yang belum terbakar saya welcome tapi kalau yang sudah terbakar saya kira kita habiskan uang di tempat yang tidak bermanfaat.

Kemudian PTI (Penambangan Tanpa Ijin), saya kira PTI ini sampai dengan 7000. Yang pertanyaan saya dimana penegakan hukumnya, kok sampai 7000 tidak ada orang yang masuk penjara akibat Penambangan Tanpa Ijin ini. Titipan dari teman saya di samping teman Demokrat juga, Aceh, perambahan hutan untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah ini adalah basis kopi. Tapi sekarang ini dirambah begitu juga terhadap PT. Sawit Agro Nanggroe Abadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini menanam diluar HGU-nya sebanyak 302 hektar. Ini adalah bagian rakyat tetapi justru diambil juga, sehingga rakyatnya tidak kebagian.

Terakhir adalah konservasi Ganda Dewata di daerah saya Ibu ada konservasi Ganda Dewata hanya sampai saat ini satkernya masih melekat di Makassar. Kalau bisa juga dibuat Satker satu untuk di Sulawesi Barat khusus untuk menjaga kelestarian Ganda Dewata.

Dan yang paling terakhir adalah kami pasti Komisi IV DPR RI mensupport Ibu dan saya termasuk orang yang ada di Banggar akan mensupport Ibu dan saya sarankan Ibu jadi Menteri Indonesia. Karena kami di Komisi IV DPR RI ini adalah Komisi IV DPR RI untuk Indonesia.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidyah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih teman-teman dari Fraksi Demokrat

Berikutnya kami persilakan dari Fraksi PKS Pak Johan silakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua, Anggota yang saya hormati,
Ibu Menteri dan seluruh Dirjen.

Tadi sesaat setelah kita rapat Kapoksi saya minta ijin atau menyampaikan beberapa hal terhadap Kapoksi dan pada saat ini saya akan membacakan sikap PKS saja.

Yang pertama, hasil rapat kami di Fraksi PKS mencatat beberapa hal terkait dengan anggaran ini. Pertama, bahwa penyusunan pagu anggaran 2020 di paparkan berdasarkan program sedangkan penyampaian registrasi anggaran tahun 2019 berdasarkan nama eselon I-nya. Nah, ini perlu menjadi catatan.

Yang kedua adalah terjadinya penurunan anggaran cukup signifikan pada program pengendalian DAS dan hutan lindung tahun 2019 Rp3,2 triliun sedangkan tahun ini Rp2,8 triliun. Ketiga, ada kenaikan anggaran cukup signifikan pada program konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, tahun 2019 Rp1,6 triliun dan tahun 2020 Rp2,05 triliun.

Keempat, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan turun Rp574 miliar dan tahun 2019 dan hanya menjadi Rp350 miliar di tahun 2020. Kelima, program pengelolaan sampah dan limbah B3 sebesar Rp287 miliar dan naik Rp360 miliar pada tahun ini. Perhutanan sosial tidak ada perubahan, yaitu sebesar Rp450 miliar.

Atas hal itu, PKS menyatakan yang pertama, Fraksi PKS menerima penyampaian anggaran berdasarkan program bukan berdasarkan Eselon I. Pada implementasinya tidak ada perubahan hanya merubah judul saja tata bahasa seperti halnya Dirjen Pengendalian DAS dan hutan lindung.

Dua, pertimbangan apa yang mendasari penurunan pada anggaran DAS dan hutan lindung dan sepertinya mengalihkan anggaran kepada program konservasi nilai kurang lebih sama, yaitu Rp400 miliar. Tiga, begitu pun halnya rasionalisasi pada penurunan pengendalian pencemaran. Apakah hal ini menandakan sistem pengendalian pada sumber misalkan pabrik atau UKM menjadi lebih terkendali. Kami pikir tidak karena laporan masyarakat terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan terus terjadi seiring dengan laju eksploitasi. Mohon dijelaskan Ibu Menteri.

Yang keempat, program perhutanan sosial tidak ada perubahan dari sisi anggaran padahal kita punya target 12,7 juta hektar perhutanan sosial. Sebagai instrument pengentasan kemiskinan harusnya program pro rakyat ini dinaikkan dari sisi anggaran sehingga kuantitas dan kualitas program menjadi terakselerasi. Kami meminta laporan perkembangan realisasi perhutanan sosial dan capaian kualitas untuk pengentasan kemiskinan.

Lima, Fraksi PKS mengapresiasi peningkatan anggaran dalam pengelolaan sampah dan limbah B3 kita perlu bergerak mengolah sampah dengan sistem sanitasi dan tidak lagi menggunakan open dumping karena hal itu tersebut mencemari lingkungan. Upaya modernisasi harus dilakukan termasuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah kami harap tidak lagi terulang importasi sampah yang merugikan pencemaran masyarakat.

Selanjutnya Pimpinan, terjadap isu-isu actual yang sudah disampaikan yang pertama tentang pemutusan hubungan dengan WWF. Ada sekitar 130 proyek WWF Indonesia jangankan berkaitan dengan konservasi dan pelestarian lingkungan. Ini ada sekitar 19% atau 30 proyek dari Aceh sampai Papua yang terdampak dengan keputusan ini.

Terhadap hal ini PKS menyatakan:

1. Fraksi PKS meminta kejelasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kelanjutan proyek konservasi lingkungan yang

selama ini dilaksanakan bersama dengan WWF, kami khawatir dengan keberlanjutan pelestarian terhadap satwa yang dilindungi menyusul pemutusan hubungan kerjasama kehutanan dengan atau bidang konservasi.

2. Apakah infrastruktur sarana dan prasarana KLHK siap melanjutkan kerja-kerja konservasi yang selama dikerjakan atau dibantu kerjasamakan bersama WWF anggaran KLHK pada tahun ini untuk program konservasi naik sebesar Rp400 miliar.

Terhadap penanganan sampah atau penanganan sampah impor ilegal. Menurut PKS, yang pertama penggunaan judul saja kita sudah salah. Penggunaan judul sampah impor ilegal adalah sebuah kesalahan bahkan tidak istilah sampah impor legal saja tidak kita kenal. Sebab Undang-Undang secara tegas melarang impor sampah. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah Bab 10 tentang larangan Pasal 29 “setiap orang dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, b. mengimpor sampah, c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Karenanya Fraksi PKS menolak impor sampah, limbah dalam bentuk apapun masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 yang menjadi dasar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Permendagri Nomor 31 Tahun 2016. Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah untuk membuat komitmen dengan negara pengekspor limbah plastik agar bersama-sama mencegah masuknya limbah plastik ke Indonesia sebab itu hal bertentangan dengan perundang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu Pak Ketua, pendapat dari Fraksi PKS yang saya sampaikan sebagai hasil rapat Fraksi.

Terakhir Ibu Menteri, saya dari Dapil NTB I pertama meminta untuk Taman Nasional Gunung Rinjani mohon segera ditangani track Rinjani yang rusak terutama yang dari Senaru ke Puncak, akibat gempa kemarin itu rusak. Yang kedua, mohon juga difasilitasi untuk Taman Nasional Gunung Tambora itu ada sempat disampaikan konsep Nomade Tourism agar bisa difasilitasi pelaksanaannya.

Yang berikutnya terakhir Ibu, mohon difasilitasi ini ada beberapa isu di Taman Nasional Gunung Rinjani tentang keberadaan kereta gantung yang akan dipakai oleh orang-orang yang ingin menikmati Rinjani tetapi tidak punya kuasa untuk mendaki. Ini menjadi polemik di masyarakat, tolong difasilitasi antara keinginan investor itu dengan keinginan dari masyarakat yang ingin menjaga kelestarian dari Gunung Rinjani.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PD (Dr. Ir. SUHARDI DUKA. M.M.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (Dr. Ir. SUHARDI DUKA. M.M.):

Minta sedikit waktu saya mau serahkan ini sertifikat kepada Ibu Menteri sebagai pertanggungjawaban saya kepada masyarakat.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Suhardi, jangan lupa diphoto Pak.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

Riezky Aprilia Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Riezky.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Mumpung ingat Ibu Menteri.

Terima kasih Pimpinan.

Terkait dengan tadi WWF, tadi disampaikan bahwa kementerian sedang mengevaluasi dalam arti kata mungkin meninjau ulang terkait eksistensi WWF kedepan. Berpatokan dengan kejadian yang terjadi di masa lalu, apabila memang dibutuhkan saya melemparkan disini apabila memang dibutuhkan Komisi IV DPR RI untuk memediasi antara KLHK dengan WWF, saya harap rekan-rekan disini juga bersedia untuk membantu KLHK agar kedepannya bisa, kita sama-sama terbuka terang benderang apakah eksistensi WWF kedepan masih diperlukan atau tidak, ini juga memperkuat dari teman-teman Fraksi PKS tadi mempertanyakan terkait WWF.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Kiki.

Kita sambut baik, niat baik, kalau kita diminta, diperlukan untuk mediasi saya rasa semua teman-teman Komisi IV DPR RI untuk memediasi.

Bapak Ansy ada intrupsi?

Silakan Pak.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Budi terima kasih.

Memang sengsara juga kalau tidak bicara Pak Budi, apalagi kalau memang ada titipan dari Dapil Ibu Menteri. Ibu Menteri, informasi tanggal 12 Februari kemarin di Laboan Bajo Manggarai Barat para penggiat konservasi dan pariwisata itu turun ke jalan demonstrasi mengkritik investasi di sejumlah destinasi di Taman Nasional Komodo Ibu. Sebagai wakil rakyat dari NTT aneh kalau saya tidak bicara soal ini Ibu, karena persis satu minggu yang lalu. Maka dalam forum yang terhormat ini saya minta ijin untuk menyampaikan catatan. Saya yakin betul Ibu, KLHK melakukan program konservasi di Taman Nasional Komodo tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem Taman Nasional Komodo dan memastikan keberlangsungan satwa langka Komodo. Tapi disisi lain Ibu, kita melihat ada ijin investasi di Taman Nasional Komodo saya sebut saja PTSKL seluas 21,1 hektar are di Rinca, KWE seluas 151,94 di Pulau Komodo dan KWE lagi seluas 274,13 di Pulau Padar.

Selanjutnya rapat Direktorat Jenderal KSDAE tanggal 30 Januari 2020 memutuskan ijin diberikan kepada PD Flobamora dan sejumlah perusahaan lainnya dalam tanda petik disebutkan disitu. Rapat kali lalu saya mengharapkan ada kajian akademis, karena menurut saya tidak mudah mendamaikan antara konservasi dan investasi. Yang saya lihat adalah yang terjadi di Taman Nasional Komodo yang paradigma dasarnya adalah konservasi ini mengarah kepada privatisasi. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tagline pariwisata super premium Ibu.

Saya ingin mengetahui persis apa bentuk dari investasi yang mau dibangun di 3 pulau ini Ibu. Berapa besar investasi yang digelontorkan di sana, dan apakah sudah ada kajian baik dari aspek ekonomis, sosiologis, antropologis, ekologis dan bahkan kosmologis. Karena mengingat Taman Nasional Komodo ini tempatnya hidupnya Komodo dan juga masyarakat setempat yang sudah sangat lama, ada interaksi antara kedua belah pihak disana.

Yang kedua Ibu, soal alih fungsi lahan hutan Bowosi yang ada di Kota Laboan Bajo. Kali lalu saya juga sudah ngomong soal ini tapi dalam Rapat Dengar Pendapat Ibu tidak ada. Ini hutan tutupan Kota Laboan Bajo, sudah dikonversi menjdai lahan pariwisata buatan yang akan dikelola oleh Badan Otoritas Pariwisata. Ini kajiannya apa Ibu, beberapa waktu yang lalu sudah terjadi banjir dan citranya akan sangat buruk kalau kota destinasi pariwisata internasional itu kena banjir Ibu. Ini akan sangat tidak baik.

Yang berikutnya saya juga minta penjelasan soal penataan Pulau Rinca, Pulau Moang, Pulau Boro atau Robong yang oleh Menko Bapak Luhut Binsar Panjaitan sudah diumumkan sebagai kawasan yang akan ditata terkait dengan agenda pertemuan G20 pada tahun 2023 mendatang. Tekanan saya adalah ketika bicara Taman Nasional Komodo mestinya perspektif yang dominan adalah pariwisata yang mengutamakan nature Ibu. Sementara di daratan di Laboan Bajo, di Flores, lebih mengutamakan eksplorasi aspek culture. Nah, hal ini yang jujur saja belum saya lihat Ibu. Jangan sampai nanti investasi besar-besaran mengancam keberlangsungan hidup Komodo, kalau tidak mengancam juga ingin tahu karena terus terang lambang NTT Komodo Ibu, itu identitas kami. Hari ini saya sengaja pakai tetunan NTT dari Manggarai Barat, karena saya memang mau berjuang soal ini.

Yang terakhir mungkin Ibu, dari tempat ini saya memohon Ibu mungkin turun ke Laboan Bajo bertemu dengan para penggiat konservasi, bicara dengan aktifis lingkungan disana, sehingga kemudian kita semua ini bisa mendapatkan hal yang positif dari upaya yang dilakukan disana Ibu. Taman Nasional Komodo saya tegaskan adalah ruang hidup bagi Komodo dan penduduk asli dan Taman Nasional Komodo adalah modal utama pariwisata NTT. Karena itu Ibu, hati-hati melakukan sesuatu di Taman Nasional Komodo.

Sekian dan terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hansi.

Berikutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi PAN kami persilakan.

F-PAN (HEARUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Ibu Menteri, Bapak Wamen, beserta seluruh jajaran KLHK yang juga saya hormati, Para pejabat Badan Restorasi Gambut yang juga hadir.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Fraksi PAN. Ingin kami sampaikan Ibu, pertama kasus perhutanan sosial, perhutanan sosial itu butuh proses pengawasan, pengendalian. Ini mungkin terjadi Ibu, di seluruh Indonesia setelah mereka bisa melakukan proses pengelolaan hutan oleh masyarakat yang ujungnya mereka butuh sertifikasi lahan. Dan ini tentu akan terjadi di mana-mana. Saya ingin sampaikan di Dapil di daerah Jawa Barat, kebetulan ini ada situs Ciburui karena ini warisan dari ajaran Sinsak Kandang Karsian Resi Guru Prabu Darma Siksa Raja Kalunggung, Pak Dedi

tahu betul tentang sejarah ini. Karena ikatnya ikat mahkota wangsa yang Pak Dedi pakai dan itu yang pertama kali memakai adalah Batara Sempak Wajah Ibu, Sunda Empire itu kesasar.

Yang ingin saya sampaikan Ibu, di kemiringan hampir 50 ke atas atau 45 ke atas mereka tanam tanaman tahunan atau horti. Tidak terbayang bagaimana air para masa musim penghujan berwarna coklat pekat dan itu tunah yang turun Ibu. Dan tentu terjadi sentimentasi yang cepat di Sungai Cimanuk ujung-ujungnya. Dan ini ribuan hektar tentu itu di area Gunung Ciburai Ibu, kami kemarin di Dapil bertemu dengan beberapa teman-teman terutama para penggiat konservasi lahan yang punya perhatian yang serius terhadap hal ini.

Teman-teman berharap bahwa daerah itu menjadi daerah kalau tidak jadi Taman Nasional karena ada situs Ibu, bisa menjadi cagar alam. Jadi kalau konsep di Sunda dulu mungkin di daerah Pajajaran ada hutan larangan, ada luwung tutupan. Jadi banyak tahapan-tahapan hutan itu dan hukumnya cukup dengan pamali dan jurik, aman hutan itu. Sekarang ada Polhut, ada Polisi, ada tentara, hutan malah habis Ibu. Tidak tahu apa sih masalahnya sekarang itu.

Ini butuh kami sampaikan dan butuh pengendalian dalam kawasan perhutanan, tidak boleh tidak karena kalau dibiarkan ini akan semena-mena Ibu. Kita sudah kehilangan 26 juta hektar dari tahun 2001 luas kawasan hutan kita. Apa jaman Ibu Menteri akan berkurang, menahan laju pengurangan lahan hutan ini atau bertambah cepat. Itu tergantung kinerja Ibu Menteri dan seluruh *stake holder* termasuk kita di Komisi IV DPR RI.

Yang kedua, kami sampaikan juga kepada Ibu Menteri beserta seluruh jajaran KLHK, ada ada memang di kita para pengusaha yang tidak bertanggungjawab terhadap RTRW, ini butuh planologinya yang bergerak. Jadi daerah-daerah yang harusnya itu daerah hutan dan serapan air barangkali bisa bebas semena-mena jadi lahan perumahan dan lain-lain. Dan tidak ada teguran, seolah-olah tidak ada teguran dan tidak ada perjuangan dari KLHK untuk melakukan sebagai proses pelurusannya, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Puten Pak Gakum, bukan kepada Bapak Gakum ini tapi kepada KLHK untuk pelurusannya.

Yang selanjutnya kepada Ibu Dirjen yang membawahi limbah dan sampah, lingkungan hidup. Di daerah Garut ada yang akut Ibu, limbah pengolahan kulit, daerah Garut Kota Sukaregan. Kurang tahu itu harus bagaimana manajemennya Ibu, apa ipal komunal itu yang jadi solusi atau apa. Tentu kami dengan jajaran lingkungan hidup butuh meninjau ke lapangan langsung nanti pada saatnya.

Ibu Menteri, *insya Allah* Fraksi PAN, apa yang Ibu Menteri sampaikan tentang bagaimana agar kita mampu melakukan proses rehabilitasi dan konservasi lahan kehutanan dengan biaya yang akan ditambah, *insya Allah* Fraksi PAN mendukung. Tentu dengan beberapa catatan Ibu, saya ingin memberikan catatan RUU Cipta Kerja yang hari ini sedang didorong dari Omnibus Law itu yang hari ini menyeret posisi para pelaku, para dalang

kebakaran lahan hutan kita untuk bebas. Di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan boleh dilihat Pasal 49 yang pertama memang menyatakan pemegang hak atau ijin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Hari ini Ibu, di RUU Cipta Kerja mengubah bunyi Pasal 49 Undang-Undang Kehutanan itu menjadi pemegang hak atau perijinan berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya.

Yang hilang kata tanggungjawab, artinya hilang kepidanaannya dan ini butuh seleksi kita kedepan bagaimana cara pandang kita kedepan tidak boleh lagi kita lengah. Dan KLHK sudah merilis hampir 64 pengusaha, baik asing maupun dalam negeri yang kira-kira yang menjadi dalang kebakaran lahan ini, kebakaran hutan kita itu. Dan dilaporkan tapi biasa-biasa saja tidak ada masalah. Saya kadang curiga bahwa ada beberapa orang yang melakukan penetrasi untuk merubah titik-titik Undang-Undang yang akhirnya menjadi ruang bagi mereka untuk bebas. Dan ini kami ingatkan sekali lagi Ibu, kalau anggaran kita bisa sampai Rp15 triliun untuk konservasi dan rehabilitasi lahan dan kita setuju dan Ibu Menteri dan Presiden menyetujui apakah kita akan merehab lahan yang dirusak oleh dalang-dalang itu atau lahan yang mana yang kita pulihkan. Kalau anggaran yang sebesar itu akan merehab lahan-lahan yang harusnya mereka bertanggungjawab dan menggunakan uang rakyat, hari ini Fraksi PAN menolak dengan tegas tidak akan memberikan persetujuan anggaran itu.

Kami butuh pertanggungjawaban Ibu Menteri dan seluruh jajarannya terhadap anggaran yang akan kita dorong kalau itu terjadi. Ini pertanggungjawaban politik kita, pertanggungjawaban moral kita dan tanggungjawab kerja kita dan tanggungjawab tentang masa depan hutan kita.

Terima kasih Pimpinan, terima kasih Ibu Menteri, suaranya keras *insya allah* hatinya lembut.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sampurasun Kang Dedi.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Haerudin dan teman-teman dari Fraksi PAN.

Terakhir dari Fraksi PPP tapi kayaknya tidak ada. sebelum Pak Dedi nanti penutup mungkin Bapak Muslim tadi sudah saya iyaikan.

Pak Muslim silakan Pak.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Ibu Menteri beserta jajarannya.

Pertama, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Kapoksi saya berkaitan dengan kondisi khusus pertama berkaitan di, ini 3 kabupaten hasil kopi terbesar di Aceh Ibu Menteri, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Luwes itu kurang lebih lahannya sekitar 70.000 hektar. Dalam 3 tahun terakhir ini menjadi keresahan masyarakat di sana Ibu Menteri, ini kebetulan saya sampaikan dengan Pak Plt Gubernur dan beberapa Bupati, ini terjadi perambahan hutan. Padahal kita tahu betul, 3 kabupaten inikan kopi terbaik bukan hanya di Indonesia saja tapi di dunia Ibu. Hari ini masyarakat mulai resah akibat perambahan hutan. Tentu dalam hal ini kita berharap nanti pihak Kementerian KLH itu terjun langsung kondisi seperti apa. Kalau tidak ini masyarakat terus tergerus lahan-lahan yang ada disana sehingga yang kita agung-agungkan kopi Gayo ini jangan sampai tinggal cerita Ibu Menteri. Ini pertama ya.

Yang kedua, saya sudah pernah ketemu Bapak Dirjen KSDA ini persoalan gajah. Saya pikir ini menjadi menarik bahkan sudah difilmkan, saya sudah nonton filmnya. Jadi artinya ini konflik gajah dengan manusia ini luar biasa dan Aceh itu bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan saja ini bahkan masyarakat juga menjadi korban berapa orang yang sudah kehilangan nyawa dan perkampungan sudah banyak yang rusak. Tentu dalam hal ini saya berharap dari Ibu Menteri ini kita cari solusi komprehensif bukan solusi dalam waktu yang singkat, misalnya pembangunan barel dan segala macam yang m menghabiskan anggaran begitu sehingga efek kepada penanganan gajah tidak tuntas.

Tentu dalam hal ini terima kasih Ibu Menteri, Bapak Dirjen akan ke Aceh hari Senin. Tentu kita harapkan akan menjadi solusi seperti yang terjadi di Sumatera Utara Pak Budi, di sana ada namanya Tangkahan di Langkat itu, itu akhirnya gajak-gajah ini relokasi, mereka dididik diarahkan menjadi kawasan pariwisata, sehingga turis-turis nanti akan datang. Ini saya berharap ini solusi yang terbaik, jadi sehingga manfaat buat masyarakat juga dirasakan. Sehingga efek dominonya juga pariwisata akan jalan. Ini mungkin kita mohon dukungan dari Ibu Menteri.

Terakhir tentu kita mengapresiasi kepada Ibu Menteri ini bisa dilihat dari paparannya begitu sempurna. Tentu dalam hal ini dukungan, terima kasih Ibu Menteri dengan jujur, dengan apa adanya kita akan dukung sepenuhnya terhadap anggaran ini. Jadi sehingga yang selama ini kita anggap ilegal logging dan segala macam kita tidak dengar lagi. Bagaimana hutan-hutan dimanfaatkan termasuk hutan sosial dan lain-lain ya. Ini harapan dari kita semua tentu kita akan dukung sepenuhnya selama itu kebijakan bukan buat kepentingan masyarakat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Muslim.

Dan terakhir sebelum kita nanti tanggapan Ibu Menteri Kang Dedi Mulyadi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ijin ke Anggota saya menyampaikan disini.

Ibu Menteri yang saya hormati, para Dirjen.

Kalau kita mengidentifikasi problem lingkungan buku 7000 halaman tidak cukup untuk menulis pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Karena hampir semua daerah mengalami problem ini. Bukan hanya daerah padat penduduk kayak di Jawa Barat tetapi di luar Jawa juga sudah mengalami problem yang sama. Apa sih yang menjadi faktor penyebab utama, menurut saya yang pertama adalah benahi RTRW secara keseluruhan, secara komprehensif kalau istilah saya KLH coba membuat audir terhadap RTRW ini. Karena jujur kita katakan penyusunan RTRW di daerah itu ditangani oleh pendekatan-pendekatan kepentingan bukan hanya daerah mungkin diberbagai tempat juga sama. Pertimbangan kepentingan ekonomi jauh mendominasi dalam setiap pengambilan keputusan, setelah itu adalah revisi RTRW juga memakan waktu yang cukup lama bisa bertahun-tahun karena lama di tingkat provinsinya. Sehingga problem lingkungannya terus berlanjut dalam setiap waktu.

Nah, kalau seperti ini maka saya menyarankan ada aspek yang kedua yang dilakukan adalah KLH membuat audit terhadap seluruh wilayah kebijakan yang punya implikasi, baik perubahan hutan menjadi perkebunan sawit. Perubahan kawasan persawahan, kawasan perkebunan berubah jadi kawasan industry atau perubahan kawasan-kawasan lain yang berubah menjadi kawasan property, sehingga nanti kita bisa membuat statistic grafik dalam jangka panjang, bobot ekonomi kah yang akan menjadi pertimbangan utama kita atau bobot lingkungan. Kalau bobot ekonomi menjadi penting maka solusi lingkungannya apa dalam jangka panjang harus dibuat, karena apa? karena saya yakin hari ini kita diajak makan ikan, tapi saya sudah punya beberapa contoh kasus anak-anak mulai kena autisme karena konsumsi ibunya terhadap ikan tinggi dan ternyata ikannya tercemar oleh limbah merkuri, kan ini ancaman masa depan. Sehingga kalau indeks pembangunan kita mau mengarah kepada kesejahteraan barangkali hari ini ada catatan penting Buton itu negara yang tetap mempertahankan hutannya memang secara ekonomi menurut Bank Dunia tidak mengalami kemajuan akan tetapi masyarakat jauh lebih Bahagia dan lebih sejahtera.

Nah, perspektif inilah yang menjadi catatan utama dan saya menimpali apa yang disampaikan oleh sahabat saya Bapak Haerudin apalagi kalau ngomong Jawa Barat, sudah hampir tidak bisa nunjukin bukit mana yang tidak gundul. Sudah hampir tidak bisa lagi nunjukin pantai yang mana yang pasirnya

tidak diangkut, pantai mana yang tidak mengalami abrasi, hampir tidak bisa menunjukkan lagi sungai mana yang tidak tercemar, hampir tidak bisa nunjukkin lagi sungai mana yang tidak ada sampahnya. Kemudian juga propertynya pembangunannya secara terus menerus massif hampir seluruh areal sawah pun sudah berubah, sehingga berikutnya adalah kalau ngomong tentang fundamentalisme saya selalu punya pemahaman ketika alam ditinggalkan, ketika manusia jauh dari habitat utamanya, tanah, air dan udara yang menjadi ideologi ruh kemanusiaannya radikalisme adalah pilihan baru bagi sebuah masyarakat yang tercerabut dari lingkungannya.

Dan terakhir pesan saya adalah kereta cepat hari ini banyak menuai protes terutama pembuangan limbahnya. Ada yang menimbun sawah di daerah Bandung Barat dan Purwakarta, kemudian ada yang menimbun kebun mohon Kementerian KLH segera turun kelapangan agar aspek negatifnya segera terselesaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Kang Dedi.

Demikian pertanyaan dan tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR RI.

Selanjutnya kami persikana kepada Ibu Menteri KLHK dan Kepala BRG untuk menyampaikan jawabannya.

Silakan Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati,
Ibu dan Anggota yang kami hormati.

Saya mohon ijin mungkin saya nanti lebih baik menyiapkan juga jawaban tertulis karena menyangkut angka-angka justifikasi dan lain-lain, tetapi secara *over view* saya ingin merespon beberapa hal. Pertama, saya sangat mendukung catatan yang terakhir dari Pimpinan Bapak Dedi, bahwa berbagai kesulitan situasi lingkungan saat ini secara fisik yang menjadi tanggungjawab itu adalah karena proses akumulatif yang sangat-sangat panjang. Saya kira dalam kurun waktu belasan atau puluhan tahun dan tentu saya juga mendukung yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Kiki bahwa tidak bisa semuanya hanya diselesaikan oleh KLHK. Karena kelautan misalnya untuk masalah pesisir dia juga punya inspektur atau PPNS. Pertambangan juga sebetulnya dia punya juga inspektur tambang atau PPNS. KLHK memang dengan adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum memang akhirnya tanda kutib berapa di depan bersama-sama kami mencoba menarik kawan-

kawan dari sektor yang lain tapi tentu harusnya kolaborasinya lebih menonjol. Saya berterima kasih atas catatan-catatan yang sangat mendukung ataupun menstimulir motivasi kami seluruh jajaran di Kementerian KLHK untuk semakin berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi atas dukungan yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas berbagai catatan dan ijin ada beberapa hal misalnya tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Fakhry dari Aceh yang kebut bibit desa bantuan untuk Aceh Tenggara dan lain-lain. Kami mengikuti dengan baik Aceh Tenggara termasuk Karhutla, bencana-bencana dan lain-lain memang program KLHK di 2020 nanti saya juga mohon dukungan ketika harus terjadi revisi antar program Bapak Sekjen, karena memang kebutuhan untuk kebun-kebun bibit desa dengan kapasitas per desa misalnya sampai 60.000 batang bibit itu memang ada kebutuhan. Oleh karena itu, untuk Aceh Tenggara dan berbagai daerah rawan longsor lainnya menjadi perhatian kami.

Kemudian tentang kantor Taman Nasional Gunung Leuser kita sudah menulis surat ke Kantor Menpan RB sudah disampaikan. Dan nanti sekaligus dengan yang Tambora saya coba minta Bapak Sekjen untuk angkat dan bahas kembali ketika membahas tentang organisasi KLHK di kabinet yang baru ini karena ini prosesnya sedang dalam akhir, jadi nanti kami coba angkat.

Kemudian Taman Nasional Gunung Leuser tentu menjadi perhatian kami dan saya tahu persis bahwa itu konsen internasional untuk Taman Nasional Gunung Leuser itu sangat tinggi terutama dari Eropa saya kira itu menjadi perhatian kami juga.

Kemudian saya memperhatikan catatan bahwa nanti dalam kaitan dengan FGD untuk Omnibus Law kami mencoba nanti menjelaskan bagaimana desain implementasinya sehingga menjadi terang daripada hanya norma-norma didalam pasal-pasal yang mungkin bisa diterjemahkan dalam arti banyak. Saya juga berterima kasih dan sependapat bahwa berbagai usulan yang tadi disampaikan oleh KLHK dalam bentuk usulan program dan dukungan dari yang terhormat Anggota Komisi IV DPR RI dan Pimpinan untuk dukungan tambahan pendanaan bagi RHL dan konservasi dengan basis data dan usulan yang sistematis. Jadi kami akan mempersiapkan untuk hal ini.

Tentang cagar alam dan lain-lain tadi yang disampaikan termasuk Pak Kamojang dan usul dan lain-lain. Saya akan minta ini karena airnya sudah kering nanti pada dasarnya sebetulnya Dirjen KSDAE cukup intensif saya minta turun ke Bandung Barat karena interaksi aktifisnya juga cukup tinggi tapi dalam kaitan dengan air permukaan yang sudah keringh saya akan minta juga mungkin Bapak, ini ada 3 Dirjen paling tidak, ada KSDAE, ada PPKL....

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ijin Ibu Menteri, kapan mau turun ke daerah Bandung Barat, mohon saya ikut mendampingi.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Ada KSDAE, ada PPKL, yang mengurus sungai dan ada dari PDASHL. Kemudian saya berterima kasih kepada Bapak Darori atas dukungan dan juga dukungan dari Ibu Endang untuk Litbang. Jadi kami memperhatikan dengan sebaik-baiknya untuk ini, dan terima kasih atas dukungan dari rekan dari Jubir Fraksi Partai Nasdem.

Kemudian terima kasih yang tidak terhingga dari Pimpinan untuk dukungan bagi penanganan konservasi dan reboisasi. Dan saya kira memang tepat sekali bahwa dari uraian itu tadi seperti yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Darori harusnya, Ibu Kiki dan lain-lain bahwa harusnya secara sistematis planingnya apa, konsepnya apa, sasarannya apa, kemudian rencana operasionalnya seperti apa kami segera susun dan kita akan sampaikan.

Wonogiri terima kasih dapat catatan untuk Kedung Ombo dan lain-lain. Saya minta maaf kemarin tidak berani saya ngajak karena pengaturannya di Istana, saya bilang nanti bersama-sama saya kalau diatur oleh Istana suka disuruh-suruh minggir, jadi saya bilang mesti hati-hati ngajaknya. Setelah ini mungkin cara-cara bersama-samanya itu harus diatur secara sistematis, kalau bersama saya pasti tidak ada masalah dan malah saya merasa beruntung karena kan berarti bisa dibantu untuk briging kepada masyarakat, tapi ketika acara Pak Presiden kelihatannya memang kita harus mempersiapkan dengan baik supaya tidak boleh ada yang kecewa. Saya minta maaf kemarin itu terjadi seperti itu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ibu namanya Ibu Luluk, dia mutiara terindah dalam hidupnya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ada tambahan Ibu, dekatnya sama Pak Hasan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Kemudian soal limbah B3, soal limbah secara keseluruhan sampah dan limbah pada dasarnya seperti tadi kami laporkan bahwa Undang-Undang kita melarang tidak boleh memasukkan sampah, kira-kira begitu bunyi pasalnya ke wilayah Negara Republik Indonesia, apakah Undang-Undang Nomor 18, apakah Undang-Undang Nomor 32 itu sama sekali tidak boleh. Yang terjadi adalah mereka impor scrap jadi remahan bahan baku plastik dan bahan baku kertas tetapi ternyata didalamnya ada campuran. Itu yang disebut impuritis,

ketidakmurnian. Nah, apa yang terjadi ketidak murnian ini yang diminta oleh Menteri Perindustrian adalah harus bisa ditolerir, kita reserve sebetulnya. Tetapi praktek secara internasional ada yang 2%, ada yang 4%. Kayak di Cina mula-mula boleh 4% tapi dalam kurun waktu 2-3 tahun lalu 2%, kemudian terakhir jadi 0,5%. Jadi yang di kemarin Permendag memberi impuritis sampai akan diatur kemudian, tapi sebetulnya kalau aslinya kalau KLHK memang tidak ada toleransinya, sebab saya waktu diminta penegasan saya bilang saya tidak bisa, saya ikutnya hanya di Undang-Undang, jadi tidak boleh. Oleh karena itu, langkah yang kita lakukan adalah minta dilakukan reekspor. Kita sama dalam posisi bahwa kita tidak ingin Indonesia menjadi tempat sampah.

Bapak Presiden malah menegaskan bahwa sampah yang masuk atau apalagi limbah yang masuk itu akan merusak generasi masa depan. Jadi tidak ada toleransi, tetapi karena ada kebutuhan-kebutuhan dan lain-lain ada disitu klausul yang disebut impuritis atau ketidakmurnian apakah boleh 0,5%, apakah boleh 1%, atau misalnya maksimum mau berapa persen. Biasanya yang diminta oleh dunia usaha adalah 4% tapi mungkin kita mau lihat bisa 0,5% saja atau dan sebagainya ini yang tidak selesai-selesai diskusi tentang ini. Oleh karena itu, kalau ada usulan untuk rapat gabungan saya kira kami sangat mendukung dan menyampaikan ucapan terima kasih.

Juga kamu mendukung untuk usul rapat gabungan berkaitan dengan konsen bersama mengenai tadi industry-industri ekstraktif dengan segala akibat terhadap lingkungan dengan ESDM dan sebagainya. Saya akan lihat yang IPHPS usulan di Jawa Timur, ini catatannya dari Bapak Dirjen sebenarnya ada 62 usulan, 13 sudah diverifikasi dan sudah menjadi SK, 49 masih dalam proses karena ada berbagai overlapping area. Dan selain itu karena forest cover yang diminta itu harus kurang dari 10% sehingga usulannya harus dilihat kembali. Jadi masih ada hal-hal teknis seperti itu.

Kemudian kami mencatat yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Budi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. Bahwa untuk tadi tentang sampah kita tidak mentolerir karena sesuai dengan Undang-Undang, tapi memang kenapa itu terjadi sebab ternyata ada margin harga. Jadi kalau bahan baku dari dalam negeri, dari dikumpul-kumpulin itu bahan baku yang dipisah-pisah itu harganya bisa 2 juta per ton bersih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Harganya mahal tapi bersih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Kalau yang impor cuma 60 sampai 80 Dolar saja, jadi ada margin harga yang besar sehingga proses ilegal itu akhirnya masuk. Jadi Bapak Budi yang terhormat, ini menjadi perhatian kami.

Kemudian tentang sertifikat dan lain-lain saya akan pelajari Bapak, kami akan teliti ini ada Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian

penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Jadi memang ada instrument-instrumen kebijakan yang harus dipelajari kita juga mesti lihat datanya persisnya seperti apa dan sebagainya, jadi itu ada.

Kemudian tadi yang tentang peti, saya akan turunkan saja Pak Roy Ditjen Gakkum untuk melihat yang di Bener Meriah ditambah lagi yang sawit Agro Nangro Abadi, Pak Dirjen ya. Kemudian konservasi Gandang Dewata usul taman nasional untuk Sulawesi Barat ini juga sama tadi, seperti tadi Leuser nanti kami akan cek apabila ini nanti bisa diproses bersama Kantor Menpan.

Yang terhormat Pak Johan untuk PKS, ini banyak catatannya sangat rinci saya akan menyusun saja secara tertulis. Tapi untuk taman nasional Gunung Rinjani tadi sudah ada catatan kita akan lihat kelayakannya. Tadi yang diusulkan yang jalur apa tadi disebutkan itu Senaru ke Puncak, karena ada beberapa jalur yang jalur Sembalun ke Puncak sudah selesai, sudah dibuka. Jalur Senaru ke Puncak kami segera cek kelayakannya dan kami laporkan bahwa belum ada rencana pembangunan kereta gantung di taman nasional Rinjani akan tetapi sudah ada komunikasi usul untuk wisaya dengan Heli Tourisme dari Airbus. Jadi ini masih awal, masih sangat awal belum ada ijin dan belum berproses, tetapi penjajakannya sudah dilakukan.

Kemudian taman nasional Komodo, pada dasarnya kawasan taman nasional itu selalu terbagi dalam zonasi. Jadi ada zona inti, zona tradisional, ada zona pemanfaatan. Di dalam konservasi itu ada prinsip, yaitu untuk menjaga laik support system jadi sistem penopang kehidupannya tidak boleh terganggu, kemudian mengawetkan keanekaragaman hayatinya dan memanfaatkan secara lestari.

Di Taman Nasional Komodo ijin wisata yang ada hanya ada di zona pemanfaatan dan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010. Dan di dalam Permen Kehutanan tahun 2011. Zona pemanfaatan daratan di dalam yang ada sekarang masih 824 hektar atau 0,4% dari luas Taman Nasional Komodo. Sedangkan zona baharinya kira-kira 1.584 hektar dari ruas total Taman Nasional Komodo.

Seluruh rencana wisata alam sedang dilakukan kajian secara komprehensif. Jadi kondisinya seperti itu, dan apa yang dipikirkan terhadap Rinca, Muang, Robong dan sebagainya ini memang tidak asal berproses saja. Jadi memang ada kajian-kajian dari Kementerian LHK yang terus dilakukan untuk ini. Jadi Pulau Komodonya itu hanya dia menjadi hanya untuk Komodo. Jadi nanti tidak terlalu banyak yang bisa, jadi dia tidak termasuk yang rencananya tidak termasuk yang akan massif. Makanya dipakai istilahnya premium dengan konsep membership, jadi hanya yang punya membership yang bisa melihat Komodo di taman nasional tetapi atraksinya di Pulau Rinca itu disiapkan. Tapi ini bukan di KLHK ininya standar NSPK-nya itu di Kementerian Pariwisata yang konsep wisata premium akan tetapi pengawalan-pengawalan bahwa misalnya penduduk di Pulau Komodo tidak boleh dipindahkan tetapi harus diatur, harus diberikan kekuatan nanti harus diatur. Kemudian satwa Komodonya harus cukup pakan, cukup makanan, itu bagiannya KLHK.

Di Pulau Rinca dia bisa lebih massif wisatanya, tetapi harus dengan fasilitas yang disiapkan aman. Aman untuk wisatawan tetapi juga tidak mengganggu bagi Komodonya, oleh karena itu kalau ada track misalnya jalan, dia tidak boleh tracknya itu didaratan, tapi harus di atasnya, satu meter di atas daratan. Seperti itu baru rencana-rencananya yang dikritisi atau diberikan advice-nya oleh Kementerian LHK.

Saya kira nanti secara rinci teknis mungkin bisa didetailkan saja.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih penjelasannya Ibu.

KETUA RAPAT:

Pak Ansy, kalau mau itu tolong mohon ijin dulu. Ingin pendalaman Pak Ansy?

Silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Bapak Budi Pimpinan, mohon maaf Bapak Budi.

Ibu terima kasih penjelasannya Ibu.

Sebenarnya penjelasan tertulis tadi ada beberapa tetapi jujur Ibu, jawaban tertulis pun masih normative Ibu, saya masih butuh penajaman. Dan zonasi itukan juga dibuat oleh Kementerian Ibu, zonasi pemanfaatan, zonasi inti, Pulau Padar yang dikeluarkan dari zonasi inti, ada zonasi konservasi yang saya pertanyakan itu kebijakan yang mengeluarkan yang kemudian mengkatagorikan zonasi itukan tentu harus ada kajian. Kalau dasar hukumnya sudah ada tetapi dasar hukum inikan harus ada dasar kajian akademisnya. Nah, itu yang saya mau tahu Ibu, karena begini. Tadi Ibu katakan wisata super premium iya Ibu, apakah dengan itu berarti nanti di Pulau Komodo itu yang bisa masuk hanya orang yang bisa bayar minimal 1000 Dolar US. Walaupun ini juga kita bicara lintas kementerian ada pariwisata, ada yang lain-lain kan begitu.

Ibu juga belum menjawab soal hutang Bowosi, silakan tertulis juga tidak masalah tapi sudah terjadi banjir disana Ibu. Dan memang kalau Pulau Padar sekarang Komodonya sudah hampir tidak ada Ibu, paling ada di Pulau Rinca, Gili Motang dan juga di Pulau Komodo. Nah, Ibu katakan tidak massif, maksudnya tidak massif sekarang Ibu. Saya tidak tahu kalau Ibu tidak jadi Menteri lagi inikan soal preseden Ibu. Kalau bisa dikasih dua perusahaan kenapa tidak bisa dikasih kelima atau sepuluh perusahaan. Kenapa tidak bisa dikasih kedua puluh perusahaan. Itu yang saya ingin tahu dan siapa sih yang investasi ini, saya ingin tahu. Dan juga apa kepentingan dibalik ini, apakah ada *back up* politik saya juga ingin tahu berapa besar investasinya. Karena yang mengeluarkan ijin investasi di KLHK Ibu, di zonasi ini.

Saya melihat ada perusahaan daerah namanya PD Flodamor Ibu, saya tahu persis soal ini Ibu. Makanya di kalimat saya yang terakhir hati-hati. Dan sekarang teman-teman disana sebenarnya menunggu Ibu ingin berdialog langsung dengan Ibu, kami siap Ibu, orang NTT siap untuk berdiskusi untuk ini, sehingga kemudian semuanya ini serba jelas dan terang benderang Ibu. Saya tahu bahwa kalkulasi finansial dan ekonomis ini sangat menggiurkan investor, pasti. Tetapi saya yakin negara dalam hal ini KLHK jangan sampai mau di dikte oleh investor Ibu. Karena itu, posisi saya netral Ibu, netral dalam pengertian saya ingin melihat hasil kajiannya, bukan melihat peraturannya. Peraturan harus lahir dari kajian, itu yang saya mau lihat Ibu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Hansi.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Pada dasarnya sudah ada dokumen planningnya.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ijin Ketua.

Jadi begini, saya menambahkan penjelasan bahwa taman nasional itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dibuat asal kajian-kajian dari berbagai sumber perguruan tinggi dari Pemerintah, tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, di dalam kajian itu ditetapkan zonasi dari zonasi inti rimba dan pemanfaatan. Di zona pemanfaatan itu diharapkan taman nasional itu bisa mandiri untuk membiayai kegiatan yang ada di taman nasional. Sehingga di dalam zona ini bisa dibangun berbagai macam fasilitas termasuk hotel seperti teman-teman Komisi IV DPR RI yang lalu sudah berkunjung ke Maroko, Spanyol, melihat taman nasional didalamnya ada hotel.

Nah, ini mungkin yang ditanyakan itu apakah karena zonasi ini tidak dapat patoknya. Saya khawatir zonasi ini dilanggar yang harusnya pemanfaatan dia masuk zona rimba. Ini yang perlu dilihat Ibu Menteri, apakah betul yang diijinkan itu betul-betul di zona pemanfaatan karena zona pemanfaatan kajiannya sudah panjang dengan Peraturan Pemerintah. Cuman kadang-kadang karena zonasi ini tidak ada patoknya saya khawatir bergeser yang bukan zona pemanfaatan tapi masuk zona inti.

Saya kira demikian.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ibu Menteri mungkin bisa ditanggapi Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Saya kira pada dasarnya taman-taman nasional itu memiliki study. Kita juga sudah punya tim untuk Taman Nasional Komodo dengan segala programnya. Terus terang ini memang lintas kementerian dan KLHK memang pada destinasi wisata seperti ini pada posisi atraksi wisatanya, jadi alamnya. Saya sangat memahami dan menyadari bahwa KLHK-lah benteng untuk menjaga kelestarian alamnya itu. Jadi nanti Bapak Dirjen saya kira bersama kami dan tim bisa kita melakukan diskusi-diskusi tentang ini.

Tadi ada hal-hal yang menjadi tanggungjawabnya pariwisata, ada yang perhubungan dan lain-lain. Jadi saya kira termasuk tadi soal tanahnya badan otoritas itu juga ada proses-proses pengkajian oleh tim dan lain-lain. Jadi pada dasarnya kajian itu seperti tadi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Darori ada otoritas scientific-nya, ada otoritas manajemennya. Jadi nanti saya kira bisa, pertama saya akan siapkan jawabannya yang tertulis. Yang kedua nanti kita lihat apabila perlu dilakukan diskusi-diskusi.

Selanjutnya berkaitan dengan situs di Burui, kemudian untuk menjadi taman nasional atau cagar alam itu saya kira nanti Bapak Dirjen, Bapak Wiratno kita akan lihat. Kemudian kalau bicara rencana tata ruang memang kami harus berdiskusi juga dengan Kementerian ATR dan saya juga memperhatikan catatan dari Pimpinan bahwa mungkin dipikirkan tentang bagaimana kita melakukan over view dari seluruh tata ruang wilayah. Karena pada dasarnya tata ruang wilayah itu pada prinsipnya ada 3, yaitu struktur ruangnya apa, pemanfaatannya untuk apa, pengendalian pemanfaatannya seperti apa. Jadi ini ada yang bagiannya ATR Murni dan ada yang bagian dari sektor-sektor masing-masing dan sekali lagi untuk bicara landscape alam itu memang KLHK yang punya tanggungjawab besar.

Saya kira itu yang bisa kami respon. Lain-lain nanti kami siapkan secara keseluruhan tertulis.

Demikian Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Terima kasih atas dukungan dan berbagai catatan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri terima kasih atas jawabannya, mungkin dari Kepala BRG tadi apakah ada? tidak ada ya Pak, baik.

Terima kasih Ibu Menteri KLHK dan Kepala BRG yang telah menyampaikan jawabannya. Bapak dan Ibu sekalian, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Bila tidak ada tanggapan lagi sebelum kita akhiri dan tutup Rapat Kerja kita ingin menampilkan kesimpulan rapat pada sore hari ini. Saya minta kesimpulan rapat ditampilkan.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Sebelum kesimpulan rapat mungkin titip untuk Ibu Menteri, tidak apa-apa dengan jawaban tertulis ini terkait dengan keserahan masyarakat akhir-akhir ini Ibu, yang terkait dengan pembuangan limbah radio aktif terlepas dari hoax dan seterusnya tetapi kan itu ditemukan. Itu yang di daerah Tangerang dan kita butuh respon dari Kementerian LHK apakah ini kejadian hanya sekali atau di tempat lain dan seberapa serius sebenarnya ini akan menjadi ancaman kita kedepan karena tidak semua orang memiliki pengetahuan terkait dengan itu dan hak bagi rakyat atau masyarakat untuk tahu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Luluk.

Itu nanti tertulis saja tidak apa-apa, apa bisa ditanggapi langsung.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Saya terus terang belum masuk kesitu karena di dalam Peraturan Pemerintah-nya nuklir itu dikecualikan dari wilayah otoritasnya KLHK, yaitu limbah B3. Jadi dia ditangani dan dikendalikan langsung Bapeten.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kita akan bacakan kesimpulan Rapat Kerja pada sore hari ini.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2020 per Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Restorasi Gambut terutama terkait program pemberdayaan masyarakat dan diluar kawasan hutan.

Teman-teman Komisi IV DPR RI?

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menambah anggaran sebesar Rp15 triliun untuk kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi hutan dan lahan serta perbaikan lingkungan hidup mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan hutan di Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelenggarakan Focus Group Discussion atau RGD untuk melakukan pendalaman terkait kegiatan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, rehabilitasi hutan dan lahan serta perbaikan lingkungan hidup.

Anggota Komisi IV DPR RI?

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Ketua, saya mohon maaf dan mohon ijin bahwa urutan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi hutan dan lahan dan perbaikan lingkungan. Itu dalam kesimpulan ini bukan berarti adalah urutan yang paling utamanya, sebab yang paling utamanya adalah rehabilitasi hutan dan lahannya kalau lihat kondisi lapangan yang begitu berat. Baru kemudian perbaikan lingkungan dan konservasi.

KETUA RAPAT:

Baik, bisa digeser saja.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Lebih baik digeser.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Baik, saya bacakan sekali lagi ya Bu ya.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menambah anggaran sebesar Rp15 triliun untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan hutan di Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelenggarakan Focus Group Discussion atau RGD untuk melakukan pendalaman terkait kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup.

Komisi IV DPR RI setuju?

Pemerintah, Ibu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan beberapa Menteri terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Luar Negeri untuk membahas kebijakan dan penanganan permasalahan impor saham ilegal. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menindak tegas pelaku impor sampah ilegal dengan mengenakan sanksi yang seberat-beratnya.

Komisi IV DPR RI?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Andi Akmal.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Mendengar tadi dari Ibu Menteri bahwa sebenarnya impor sampah tidak ada kan sebenarnya, yang ada itu kan sebenarnya 0,5% dari impor itu yang ada

sampahnya. Mungkin kalimatnya perlu diperbaiki Ketua, untuk kesimpulan ini karena ini berkaitan dengan persepsi nanti di masyarakat itu.

Kemudian yang kedua, mungkin perlu dipelajari juga Tatib kita kalau kita mengundang banyak Menteri, apakah memang Rapat Kerja Komisi atau Rapat Gabungan, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, masuknya Pak Andi.

Kalau saya tidak salah untuk Rapat Kerja kita bisa mengundang berapa Menteri, kalau rapat gabungan kita perlu mengundang komisi-komisi terkait di DPR RI. Kalau saya tidak salah tapi mohon nanti dicek kembali.

Ibu Menteri mungkin ada masukan mengenai point nomor 3.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Mohon ijin Ketua, sebetulnya pada konteks ini Menteri Luar Negeri tidak terlalu penting banget dalam arti kebijakannya, karena dia paling waktu show keluarnya atau mempersoalkan negara lain. Saya menulis yang lalu kepada Ibu Menlu untuk memanggil Dubes-dubes yang ternyata pengiriman sampahnya datangnya dari negara-negara itu, itu juga kita lakukan. Tetapi yang penting sebetulnya adalah Menteri Keuangan, karena pengawasannya di Bea Cukai.

Demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, mungkin sedikit penjelasan kenapa ada Menteri Luar Negeri masuk, ini terkait dengan kadang-kadang kebijakan reekspor. Kadang-kadang mungkin kita untuk bantuan Ibu Menteri Luar Negeri untuk melakukan diplomasi luar negeri dalam kebijakan reekspor. Itu saja Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bisa disetujui teman-teman Komisi IV DPR RI?

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan beberapa Menteri terkait, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk membahas pengelolaan dan pemanfaatan sampah untuk bahan baku industry kertas, industry plastik dan bahan baku energi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah plastik dan kertas untuk bahan baku industry yang dapat menggantikan sumber bahan baku yang berasal dari impor sampah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk secara bertahap melakukan penghentian impor sampah plastik dan kertas.

Teman-teman Komisi IV DPR RI ada masukan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Ada masukan?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya tidak meyakini bahwa ini adalah kewenangan Komisi IV DPR RI, lebih banyak bicara industri kita disini. Jadi saya kira cukup yang diatas sudah mencakup itu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/FPG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Jadi saya lebih menyepakati yang diatas itu sudah komprehensif, tidak usah lagi ada yang keempat. Ya pemberdayaan masyarakat itukan sudah lingkup teknis kita. Artinya itukan pekerjaan yang akan dilakukan lewat program itukan.

KETUA RAPAT:

Itu sudah ada di point nomor 1.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Kan sudah ada programnya, ada bank sampah segala macam kan.

KETUA RAPAT:

Baik, saya rasa untuk nomor 4 kita bisa kita *delete* saja. Bagaimana teman-teman Komisi IV DPR RI?

Ibu Menteri, kita *delete* saja karena sudah ada point-pointnya di atas.

Terima kasih.

Sudah dihapus saja.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Jadi gini, kan urusan pemberdayaan masyarakat lewat program sampah kan sudah ada program teknis di Ibu Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, jadi sudah ada program teknis. Paling yang harus kita dorong adalah volume anggarannya yang diperbesar. Kalau yang sekarang misalnya bisa satu desa nanti diterapkan di seluruh Indonesia harus punya satu bank sampah. Nah, caranya adalah tinggal Kementerian Lingkungan Hidup lewat Kemenkonya segera melakukan kordinasi agar program bantuan dana des aitu didalamnya terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan termasuk bank sampah menjadi kewajiban. Jadi tidak usah lagi di kita itu, teknis.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kita lanjut point nomor 4.

4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan audit lingkungan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawan perkebunan sawit, kawasan pertambangan dan kawasan industry sehingga dapat dipahami secara utuh efek dari pengembangan wilayah tersebut, baik dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, ideologi maupun sosial budaya lainnya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

“Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian untuk melakukan....”, karena di situ adalah terkait dengan perkebunan, mohon koreksi.

Terima kasih.

Perkebunanya tidak usah spesifik, perkebunan itu sudah sawit itu sudah pasti perkebunan kan, sudah masuk pertanian. Pokoknya semua perkebunan yang urusannya Kementerian Pertanian lah itu sudah.

KETUA RAPAT:

Mbak Kiki, permasalahannya kita Rapat Kerja ini dengan Kementerian LHK. Kita kalau masukan itu ada Kementerian Pertaniannya belum tentu Kementerian Pertanian di Rapat Kerja ini menyetujui.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Inikan Kementerian Lingkungan Hidup itu dalam posisi independent. Karena kalau ngomong lingkungan hidup kan ngomong penyidik, ngomong auditor, auditor di bidang lingkungan. Posisinya independent, dia itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh siapa pun harus konsisten, objektif. Ini mewakili malaikat sebenarnya. Sehingga memang peruntukan kalau audit lingkungan itu memang lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup yang mengaudit pertanian, mengaudit perkebunan, mengaudit kelautan. Jadi seluruh kelembagaan pekerjaan di Indonesia diauditnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Pimpinan, mohon ditengahi Ibu, karena ini terkait ada perkebunan. Tadi Ibu Menteri, di awal menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian LHK sendiri, terutama Karhutla dan lain-lain yang terkait dengan mana yang perkebunan dan mana hutan, yang mana ini itukan yang perlu kita selesaikan juga. Itu saja menurut saya.

Silakan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih masukannya Ibu Kiki.

Mungkin ada tanggapan dari Ibu Menteri, kami persilakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Ketua yang kami hormati.

Terminology audit lingkungan itu diatur eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Audit lingkungan hidup itu menurut Undang-Undang dilakukan atas perintah otoritas kepada pemilik kegiatan. Itu bunyinya, itu yang pertama. Tapi eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang.

Yang kedua, audit lingkungan itu mengandung konsekuensi sanksi hukum setelah itu, itu menurut Undang-Undang. Oleh karena itu Pimpinan, kalau boleh saya mencoba memahami yang dimaksudkan oleh yang terhormat

Pimpinan tadi, mungkin termoniloginya kita ambil lagi sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, bukan audit lingkungan tetapi kajian lingkungan hidup strategis.

Jadi Komisi IV DPR RI meminta kepada LHK untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis dan maka nanti didalamnya termasuk juga ada pertanian dan lain-lain disitu yang kita bawa dan sebagainya. Kemudian kalau boleh disitu disebutkan perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan tambang kawasan industry serta kalau tidak salah diberikannya nanti ada tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah provinsi, jadi setelah kawasan industry dan tadi yang diatas. Kawasan industry serta RTRW provinsi secara keseluruhan sehingga RTRW provinsi dapat dipahami secara utuh efek dari pengembangan wilayah tersebut, baik dari segi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, ideologi, maupun sosial budaya lainnya, sebagai pos policy assessment. Jadi KLHS ini menjadi assessment terhadap policy-policy yang sudah ada dan sudah berjalan.

Demikian.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Tambah satu lagi Ibu, itu yang Jawa Barat, DKI, Banten itu tata ruangnya harus disatukanm tidak bisa masing-masing lagi. Sampai kapan pun tidak akan selesai itu problem lingkungan di DKI itu.

Terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Rekomendasi KLHS-nya Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Siap.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Berarti yang berikutnya yang RTRW-nya berarti di nomor berikutnya sudah hilang esensinya.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Mbak kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Tadi saya bilang kalau mau tulis perkebunan, perkebunan saja tidak udah ditambahin sawit, BUN itu banyak loh, kenapa harus sawit.

KETUA RAPAT:

Silakan hapus sawitnya dihapus.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ibu ada apa dengan sawit Ibu? Kok senang banget Ibu sama sawit.

KETUA RAPAT:

Baik, saya bacakan ulang nomor 4.

4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan, kawasan pertambangan dan kawasan industry, serta rencana tata ruang wilayah provinsi atau RTRWP, sehingga dapat dipahami secara utuh efek dari pengembangan wilayah tersebut, baik dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, ideologi maupun sosial budaya lainnya sebagai pos policy essessment.

Komisi IV DPR RI, setuju?

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Kami mohon ijin.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Kajian lingkungan hidup strategis, itu pertama dia satu tarikan napas, kedua K-nya huruf besar, L-nya huruf besar, H-nya huruf besar, Saya-nya huruf besar.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Pimpinan, mau nanya.

KETUA RAPAT:

Ya Mbak Kiki silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya mau tanya output dari kajian ini nanti bagaimana kira-kira, karena kajian takutnya ini.

Terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Yang KLHS itu diatur dalam Peraturan Pemerintah, ada standarnya, ada sistematikanya, ada metodenya. Jadi yang disebut kajian lingkungan hidup strategis itu adalah kajian dari terhadap situasi yang ada, kebijakan yang dihasilkan ataupun yang akan direncanakan, karena ini pos policy assessment berarti yang sudah ada, dikaitkan dengan rencana-rencana yang ada dan berjalan, dikaitkan dengan program-program apa yang ada dan berjalan lalu kita merekomendasikan apa. Jadi itu sudah ada standarnya.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti kira-kira kajian ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan lain-lain.

Ibu Menteri silakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Dia juga ada daya enforce-nya sebetulnya. Di dalam Peraturan Pemerintahnya ada enforcement bahwa yang namanya tata ruang harus dengan KLHS tetapi memang kebiasaannya belum seluruhnya memperhatikan itu. Jadi yang nyeleweng-nyeleweng masih ada juga.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/FPG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Properti belum masuk masuk Ibu, kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan, property masukin, pemukiman, perdagangan dan jasa.

KETUA RAPAT:

Mungkin kita masukan kawasan wisata juga, bisa.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Saya kok jadinya rancu mensikapi nomor 4. Pertanyaan saya Ibu Menteri, yang mengizinkan kawasan hutan untuk aktifitas itu siapa? Lingkungan hidup dengan Kehutanan satu kementerian. Artinya apa, yang kemarin lepas begitu saja pemanfaatan lahan dan hutan itu, kan lucu satu lembaga kementerian sudah memberikan ijin kawasan hutan lalu dikaji lagi oleh kita, mestinya kan dari awal itu mestinya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/FPG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Saya boleh menyampaikan karena ini saya menyampaikan. Jadi dalam pandangan perspektif saya bahwa kita betul mengeluarkan ijin buat hutan dirubah, buat kawasan sawah dirubah misalnya karena disitu ada DRTRW-nya. Kemudian setelah itu kita nanti mendapatkan sebuah potret apa yang terjadi dari seluruh kebijakan ini. Kalau kebijakannya dianggap nanti aspek negatifnya lebih tinggi dibanding aspek positifnya tidak ada salahnya kita sadar diri untuk tidak mengulangi lagi kebijakan termasuk merevisi seluruh RTRW dan sejenisnya termasuk merevisi seluruh peruntukan kawasan hutan itu.

Terima kasih.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Saya mungkin menambahkan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Saya membaca ini idealnya sebelum ijin itu ada, ada kajian. Itu idealnya, faktualnya bisa juga setekah ijin itu berjalan kemudian ada *assessment post*

policy. Jadi ini sebenarnya mengkombinasikan antara dua itu, semacam audit lingkungan hidup ada *post policy assessment*, kan begitu. Itukan maksudnya, audit ekologis kan, ya sudah.

KETUA RAPAT:

Begitu Pak, Ibu?

Sudah setuju?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Untuk point nomor 5 tadi sudah dimasukkan ke point nomor 4. Untuk itu, saya minta persetujuannya untuk dihapus, saya kira semua setuju. Dengan demikian, sudah telah kita lalui pembacaan kesimpulan rapat.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/FPG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak Ketua, ini yang bisik di sebelah kanan apakah mukul pukul kekencengan itu akibat tidak datang ke kantor atau gimana katanya.

KETUA RAPAT:

Kita kadang-kadang memang kelebihan tenaga Pak Dedi, mohon maaf kalau kekerasan. Tapi yang pasti kita semangat kita semangat, kita senang kita bisa berdiskusi pada sore hari ini dialog yang konstruktif semoga untuk kita semua dan tentunya untuk rakyat Indonesia.

Sebelum kami tutup Rapat Kerja ini, kami persilakan Ibu Menteri LHK untuk memberikan sepatah kata dua kata penutup Rapat Kerja hari ini.

Silakan Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Terima kasih.

Pimpinan Komisi IV DPR RI yang kami hormati,
Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi, dari seluruh pertemuan Rapat Kerja hari ini yang substansinya sangat mendasar dan sangat prinsip, demikian pula kesimpulannya. Dan ini bila kita secara konsisten menindaklanjutinya akan membawa perubahan yang sangat besar dari profil lingkungan kita dan kehutanan kita. Sudah 5 tahun lebih baru bisa keluar yang seperti ini. Terima kasih banyak Komisi IV DPR RI.

Terima kasih Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom,
Om santi-santi om.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Menteri,

Ibu Menteri, Kepala BRG segenap Eselon I.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja kita pada hari ini. Dan atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan ataupun kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillah* Rapat Kerja ini kami tutup.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom,
Om santi-santi om.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.10 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001